



BPTD KELAS II RIAU



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2024



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan



hubdat.dephub.go.id



[@bptdkls2riau](https://www.instagram.com/bptdkls2riau)



[bptdkls2riau](https://twitter.com/bptdkls2riau)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau

Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	a. Fiky Rahman, ST	Penyusun Rencana & Pelaporan	17/01/25	
		b. Aulia Devi Kirana, S.Pd	Penyusun Rencana & Pelaporan	17/01/25	
2.	Diperiksa	Taufiq Hidayat, SE., M.MTr	Kepala Subbagian Tata Usaha	18/01/25	
3.	Disetujui	Taufiq Hidayat, SE., M.MTr	Kepala Subbagian Tata Usaha	18/01/25	
4.	Disetujui	Wisnu Herlambang, A.Md. LLAJ., S.A.P., M.M	Kepala Seksi Sarana & Angkutan Jalan, Sungai, dan Penyeberangan	18/01/25	
5.	Disetujui	Yuliansyah, S.SiT., M.M	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	18/01/25	
6.	Disetujui	Allumni Mulki, S.SiT., M.Sc	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	18/01/25	

KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Riau



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau sudah cukup baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau tahun 2024, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$) dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$).

Dari 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau tahun 2024, terdapat diantaranya 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
2. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi terealisasi sebesar 3 (target 3) tercapai 100%;
3. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
4. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 12 (target 12) tercapai 100%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
6. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A sebesar 50% (target 50%) tercapai 100%;
7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
8. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% (target 90%) tercapai 111,1%;
9. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 16,23% (target 3%) tercapai 13,23%;
10. Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan terealisasi sebanyak 6 lokasi (target 6) tercapai 100%;
11. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan terealisasi sebesar 100 Orang (target 100 Orang) tercapai 100%;
12. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 70% (target 68%) tercapai 103%;
13. Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebanyak 3 lokasi (target 3) tercapai 100%;
14. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 88 (target 88) tercapai 100%;
15. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat terealisasi sebesar 83,7 (target 100) tercapai 83,7%.

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar 94,32%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Daftar Isi



Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	v
Kata Sambutan	viii
Ringkasan Eksekutif	xi

Bab I Pendahuluan

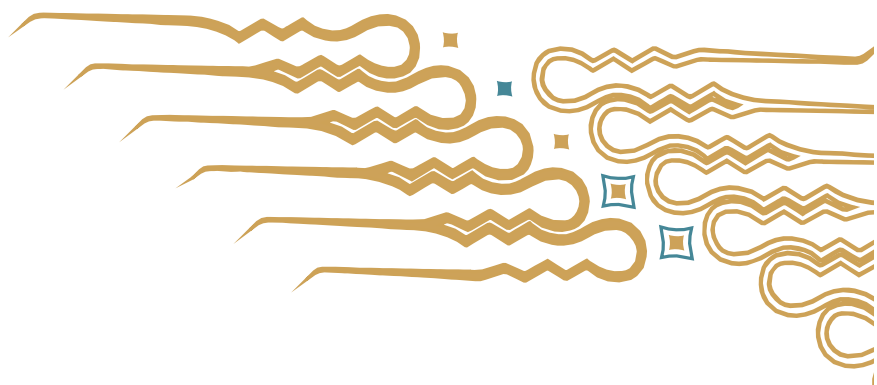
I.1 Latar Belakang	I-3
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	I-4
I.3 Sumber Daya Manusia	I-8
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-9
I.5 Sistematika Laporan	I-11

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	II-2
B. Uraian Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023	II-4
C. Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023	II-7
D. Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023	II-9

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja	III-3
III.2. Pengukuran Capaian Kinerja	III-3
III.2.1. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi	
Darat dan Keterpaduan Antarmuda Transportasi	III-9
III.2.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan	
Transportasi Darat	III-29
III.2.3. SK4 Meningkatnya Keselamatan	
Transportasi Darat	III-45



III.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Dukungan Teknis Transportasi Darat III-64

III.2.5. SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen

Perhubungan Darat Akuntabel III-70

III.3. Realisasi Anggaran III-76

Bab IV Penutup

IV.1. Penutup IV-2

Daftar Tabel



Table I.1 Petikan lampiran PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTD	I-7
Tabel I.2 Jumlah Sumber Daya Manusia BPTD Kelas II Riau	I-8
Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 – 2024	II-3
Tabel II.2 Tabel Rencana Kinerja Tahunan 2024 BPTD Kelas II Riau	II-4
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024	II-6
Tabel II.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024	II-8
Tabel II.5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024	II-9
Tabel III. 1 Capaian IKK dan SK Tahun 2024	III-5
Tabel III. 1-a Capaian IKK dan SK Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020	III-7
Tabel III.2 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	III-9
Tabel III. 3 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Prov. Riau TA. 2024	III-10
Tabel III.4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-12
Tabel III.5 Benchmark Nasional	III-13
Tabel III.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-19
Tabel III.7 Benchmark Nasional	III-20
Tabel III.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-23
Tabel III.9 Benchmark Nasional	III-25

Tabel III.10 Target Pelabuhan SDP yang Beroperasi di Prov. Riau & Prov. Kepulauan Riau	III-25
Tabel III.11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-28
Tabel III.12 Benchmark Nasional	III-29
Tabel III.13 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	III-30
Tabel III.14 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-33
Tabel III.15 Benchmark Nasional	III-34
Tabel III.16 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-39
Tabel III.17 Benchmark Nasional	III-40
Tabel III.18 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-43
Tabel III.19 Benchmark Nasional	III-45
Tabel III.20 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-48
Tabel III.21 Benchmark Nasional	III-49
Tabel III.22 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-52
Tabel III.23 Benchmark Nasional	III-53
Tabel III.24 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-57
Tabel III.25 Benchmark Nasional	III-58
Tabel III.26 Data UPUBKB Dinas Perhubungan di Provinsi Riau dalam pemenuhan Standarisasi berupa Akreditasi UPUBKB	III-59
Tabel III.27 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-62
Tabel III.28 Benchmark Nasional	III-64
Tabel III.29 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	III-64
Tabel III.30 Perhitungan IKK Tingkat Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	III-66

Tabel III.31 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-68
Tabel III.32 Benchmark Nasional	III-69
Tabel III.33 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	III-70
Tabel III.34 Perhitungan IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat	III-72
Tabel III.35 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-73
Tabel III.36 Benchmark Nasional	III-74
Tabel III.37 Perbandingan Pagu & Realisasi	III-77
Tabel III.38 Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Pada Periode Triwulan IV TA. 2024	III-78
Tabel III.39 Efisiensi Anggaran	III-79

Daftar Gambar



Gambar III.1 Grafik Realisasi IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan	III-10
Gambar III.2 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-12
Gambar III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-13
Gambar III.4 Grafik Realisasi IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	III-17
Gambar III.5 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-19
Gambar III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-20
Gambar III.7 Realisasi IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	III-21
Gambar III.8 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-23
Gambar III.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-24
Gambar III.10 Realisasi IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	III-26
Gambar III.11 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-28
Gambar III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-29
Gambar III.13 Grafik Realisasi IKK Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	III-31
Gambar III.14 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-33

Gambar III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-34
Gambar III.16 Realisasi IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	III-36
Gambar III.17 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-39
Gambar III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-40
Gambar III.19 Grafik Realisasi IKK Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	III-41
Gambar III.20 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-44
Gambar III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-44
Gambar III.22 Realisasi IKK Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	III-46
Gambar III.23 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-48
Gambar III.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-49
Gambar III.25 Realisasi IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	III-50
Gambar III.26 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-52
Gambar III.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB BPTD Kelas II Riau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-53
Gambar III.28 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	III-55
Gambar III.29 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-57
Gambar III.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-58

Gambar III.31 Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	III-60
Gambar III.32 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-63
Gambar III.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-63
Gambar III.34 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	III-65
Gambar III.35 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-68
Gambar III.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-69
Gambar III.37 Realisasi IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	III-71
Gambar III.38 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	III-73
Gambar III.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	III-74

Daftar Lampiran

- Lampiran 1.** Renja-Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;
- Lampiran 2.** Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
- Lampiran 3.** Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2024;
- Lampiran 4.** Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
- Lampiran 5.** Revisi I Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2024;
- Lampiran 6.** Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
- Lampiran 7.** Revisi II Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2024;
- Lampiran 8.** Monitoring Renaksi 2024;
- Lampiran 9.** Revisi Monitoring Renaksi 2024;
- Lampiran 10.** Lain – Lain yang dianggap perlu.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

BAB IV
PENUTUP

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 06 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menyelenggarakan fungsi:

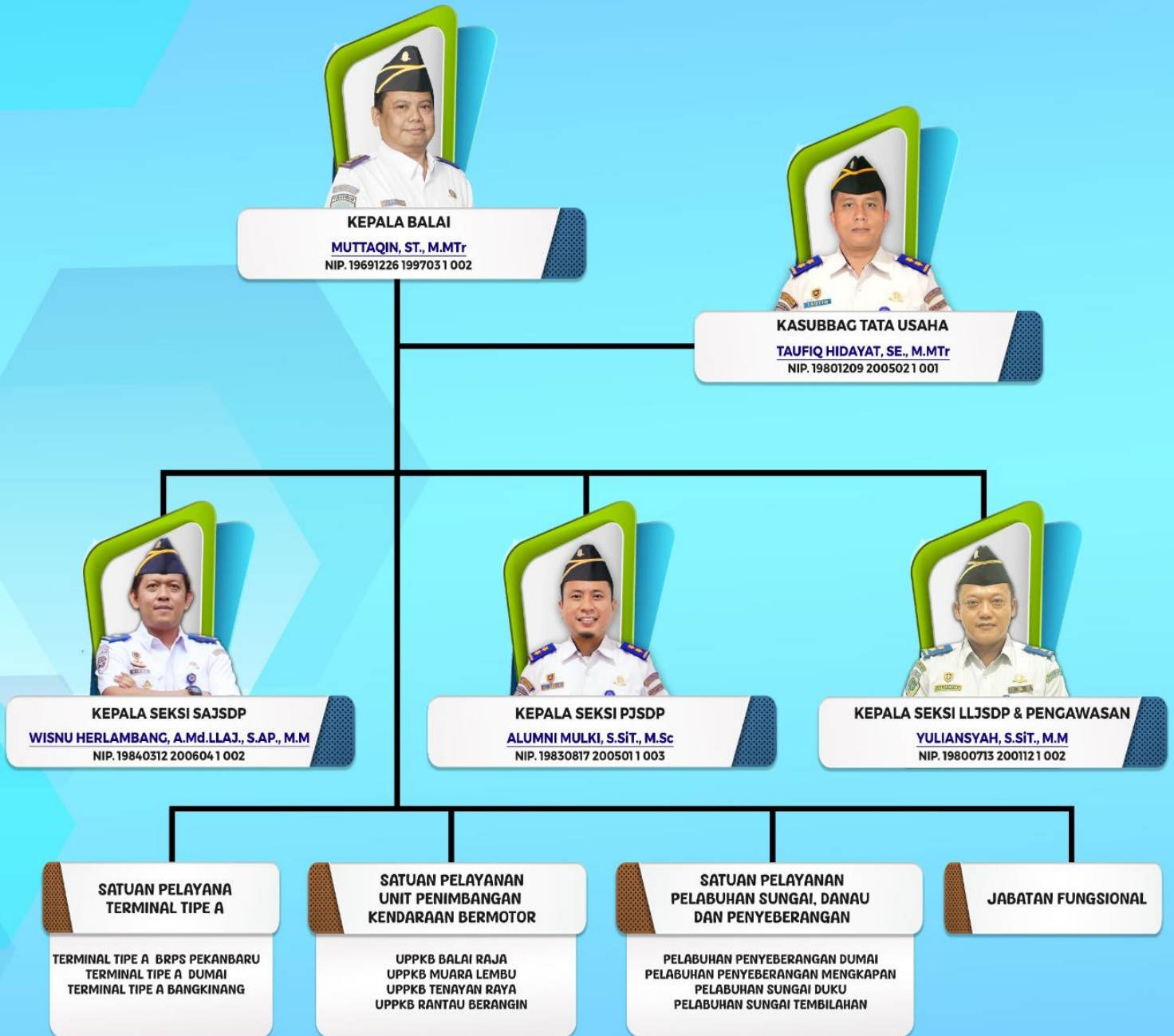
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU



1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan memiliki tugas melaksanakan pembangunan, pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta beantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyedia, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai, danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karosari, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, Pelabuhan dan penyelenggara Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal, sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi

di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, menegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta patrol dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Satuan Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, ditetapkan beberapa satuan pelayanan diantaranya :

Tabel I.1 Petikan lampiran PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTD

NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
			TERMINAL TIPE A	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
BPTD Kelas II Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau	1. BRPS, Kota Pekanbaru 2. Dumai, Kota Dumai 3. Bangkinang, Kab. Kampar	1. Balai Raja, Kab. Bengkalis 2. Muara Lembu, Kab. Kuantan Singingi 3. Rantau Berangin, Kab. Kampar 4. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru	1. Pelabuhan Penyeberangan Bandar Sri Junjungan Dumai, Kota Dumai 2. Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan, Kab. Siak 3. Pelabuhan Sungai Sungai Duku, Kota Pekanbaru 4. Pelabuhan Sungai Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir

Selain Satuan Pelayanan yang tertera pada lampiran PM 6 tahun 2023 terdapat Pelabuhan Penyeberangan (PP) lainnya yang ada di wilayah kerja BPTD Kelas II Riau diantaranya :

1. Pelabuhan Penyeberangan Sei Selari, Kab. Bengkalis;
2. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kapal Rupert, Kab. Bengkalis;
3. Pelabuhan Penyeberangan Air Putih, Kab. Bengkalis;
4. Pelabuhan Penyeberangan Kampung Balak, Kab. Kepulauan Meranti;
5. Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit, Kab. Kepulauan Meranti;
6. Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung, Kab. Kepulauan Meranti;
7. Pelabuhan Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit, Kab. Kepulauan Meranti (*dalam proses Pembangunan Tahap Akhir*).

C. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menaungi sebanyak 409 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.2 Jumlah Sumber Daya Manusia BPTD Kelas II Riau

NO	UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPPK	PPNPN	SUB TOTAL
1	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau	1				1
2	Sub Bagian Tata Usaha	9	3	0	35	47
3	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau Penyeberangan	10	1		14	25
4	Seksi Prasarana Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan	7	1		8	16
5	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	10	0		20	30
6	Terminal Tipe-A Bandar Raya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru	11	2		56	69
7	Terminal Tipe-A Dumai, Kota Dumai	3	0	1	29	33
8	Terminal Tipe-A Bangkinang, Kab. Kampar	5	1		23	29
9	UPPKB Balai Raja, Kab. Bengkalis	3	1		16	20
10	UPPKB Muara Lembu, Kab. Kuantan Singingi	5	1	0	23	29
11	UPPKB Rantau Berangin, Kab. Kampar	0	0		2	2
12	UPPKB Tenayan Raya, Kota Pekanbaru	10	2	1	12	25
13	PP Bandar Sri Junjungan, Kota Dumai	4	1		9	14
14	PP Rupat, Kab. Bengkalis	5	0		5	10
15	PP Sei Selari, Kab. Bengkalis	1	1		10	12
16	PP Air Putih, Kab. Bengkalis	2	0		10	12
17	PP Tj. Buton Mengkapan, Kab. Siak	2	0		3	5
18	PP Alai Insit - Pecah Buyung - Kampung Balak, Kab. Kepulauan Meranti	1	1		5	7
19	PS Sungai Duku, Kota Pekanbaru	4	0		7	11
20	PS Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir	2	1		9	12
TOTAL		95	16	2	296	409

D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- 1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - a. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - b. Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - c. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

- 2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

3) PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- a. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- b. Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPTD dan Satuan Pelayanan).

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, serta PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat Satuan Pelayanan yang belum memenuhi standar jumlah pegawai dalam menjalankan tupoksi.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimention Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta;
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB;
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN;
12. Rencana Pemerintah untuk penghapusan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2024 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

E. Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
 - I.2.1. Bagan Struktur Organisasi
- I.3. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- II.2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024
 - II.2.1. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024
 - II.2.2. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja
- III.2. Pengukuran Capaian Kinerja
 - III.2.1. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
 - III.2.1.1. IKK 1.1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
 - a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
 - a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
 - a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.1.2. IKK 1.3. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.1.3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.1.4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

III.2.2.1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.2.2. IKK 2.2 Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.2.3. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.3. SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

III.2.3.1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.3.2. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.3.3. IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.3.4. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.3.5. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.3.6. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

III.2.4.1. IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.2.5. SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

III.2.5.1. IKK 6.1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- a.7. *Benchmark* Nasional / Internasional

III.3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

III.3.1.1. Pagu Anggaran

III.3.1.2. Refocusing Anggaran Tahun 2024

III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2024

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024

III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

III.3.2.4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

III.3.3.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (table perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1. Penutup

IV.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Renja-Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
- Lampiran 3. Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2024;
- Lampiran 4. Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
- Lampiran 5. Revisi I Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2024;
- Lampiran 6. Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
- Lampiran 7. Revisi II Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2024;
- Lampiran 8. Monitoring Renaksi 2024;
- Lampiran 9. Revisi Monitoring Renaksi 2024;
- Lampiran 10. Lain – Lain yang dianggap perlu.



BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

II.1

URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

A. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
2			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
3			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
4			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	
5			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	
6			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	24
7	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	80
8			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
9			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
10	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
11			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	
12			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	4
13			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	1

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
14			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-
15			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	
16			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	
17			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	600
18	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	

A. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2024 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.2 Tabel Rencana Kinerja Tahunan 2024 BPTD Kelas II Riau

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
			IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	18

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2024
2	SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	30
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	3
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

B. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2024 merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 167.004.214.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	37
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	3
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	6
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	77.892.765.000
2	Pelayanan Transportasi Darat	26.218.389.000
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	36.084.311.000
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.871.923.000
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	9.819.743.000
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	11.117.083.000
TOTAL		167.004.214.000

C. Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan 2024

Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2024 merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Tahun 2024 berupaya melakukan revisi terhadap perjanjian kinerja dalam rangka menyelaraskan dan mendukung program Prioritas Pemerintah lainnya. Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tujuan revisi pada perjanjian kinerja dan dokumen terkait diharapkan dapat selaras dengan dinamika kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka penanganan krisis. Revisi I dilakukan karena adanya perubahan pejabat struktural eselon III BPTD Kelas II Riau, revisi anggaran dan adanya perubahan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan yang bertarget 0.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 173.893.347.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
	keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	12
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	3
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	6
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	76.699.173.000
2	Pelayanan Transportasi Darat	26.218.389.000
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	35.618.516.000
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.871.923.000
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	9.819.743.000
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	19.665.603.000
TOTAL		173.893.347.000

D. Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahunan 2024

Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2024 merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Revisi II dilakukan karena adanya revisi anggaran dan juga perubahan target pada salah satu Indikator Kinerja Kegiatan yang berkaitan pula dengan anggaran kegiatan tersebut.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 175.590.910.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	12
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	3
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	6

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	76.699.173.000
2	Pelayanan Transportasi Darat	26.218.389.000
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	37.185.328.000
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.871.923.000
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	9.819.743.000
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	19.796.354.000
TOTAL		175.590.910.000



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun Triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi II perjanjian kinerja dengan capaian Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel III. 1 Capaian IKK dan SK Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				61.70%			81.35%			93.18%			100%
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	17.07	17.07%	100	25.4	25.4%	100	72.73	72.73%	100	100	100%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	37	11	29.73%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				81.70%			81.70%			81.70%			100%
IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100	62.6	62.6%	100	62.6	62.6%	100	62.6	63%	100	100	100%
IKK2.2	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	50	60	120%	50	60	120%	50	60	120%	50	50	100%
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	62.5	63%	100	62.5	62.5%	100	62.5	63%	100	100	100%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				14.11%			43.53%			73.89%			87.88%
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	0	0.00%	90	50	55.56%	90	99.8	110.9%	90	100	111.1%
IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	3	87.65	84.65%	3	86.09%	83.09%	3	79.57%	76.57%	3	16.23%	13.23%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	6	0	0%	6	0	0%	6	6	100%	6	6	100%
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%	100	100	100%
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68	0	0%	68	83.33	122.5%	68	83.33	122.5%	68	70	103%
IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3	0	0%	3	0	0%	3	1	33.3%	3	3	100%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				18.75%			92%			92%			100%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88	16.5	18.75%	88	81	92%	88	81	92%	88	88	100%
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				74.75%			74.75%			74.75%			84%
IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	74.75	74.75%	100	74.75	74.75%	100	74.75	74.75%	100	83.7	84%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan					50.20%			74.68%			83.11%			94.32%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					44.67%			66.57%			81.86%			93.15%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)					3			5			7			13
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)					12			10			8			2

Tabel III. 2-a Capaian IKK dan SK Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				80%			80%			80%			76.98%			80%
IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	95.99	95.99%	100	100	100%
IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	0	0	0%	20	20	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	100%	0	0	0%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	7	7	100%	7	7	100%	17	17	100%	18	16	88.89%	12	12	100%
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				67%			67%			90%			90%			100%
IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	100	100	100%	100	100	100%	100	70	70%	100	69	69%	100	100	100%
IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	100%	30	30	100%	50	50	100%
IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				20%			101%			81%			63%			87.88%
IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	100%	60	100	167%	85	100	117.6%	90	95	105.6%	90	100	111%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	0	0	0%	3	41	37.00%	3	47	40.90%	3	13.71	10.71%	3	16.23	13.23%
IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	0	0%	11	11	100%	0	0	0%	0	0	0%	6	6	100%
IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	0	0	0%	100	100	100%	100	180	180%	100	100	100%	100	100	100%
IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	0	0	0%	68	68	100%	68	46	68%	68	68	100%	68	70	103%
IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3	3	3%	3	3	100%	3	3	100%	0	0	0%	3	3	100%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				100%			99%			121%			100%			100%
IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	70	70	100%	83.9	83	98.93%	70	85	121%	85	85	100%	88	88	100%
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				100%			123%			100%			83.10%			84%
IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	70	70	100%	80	98.75	123.4%	80	80	100%	100	83.1	83.10%	100	83.7	83.7%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan					73.33%			87.14%			92.78%			82.60%			94.32%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					64.29%			86.62%			92.69%			88.71%			93.15%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)					9			12			10			8			13
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)					6			3			5			5			2

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan akhir Tahun 2024, berdasarkan perjanjian kinerja dari 15 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, terdapat 13 (tiga belas) IKK berstatus hijau dan 2 (dua) IKK berstatus merah.

Penjelasan capaian IKK untuk setiap sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

III.2.1. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 4 (empat) IKK, yaitu:

1. IKK 1.1 : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan,
2. IKK 1.3 : Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi,
3. IKK 1.5 : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan,
4. IKK 1.6 : Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.3 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TAHUN 2024		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					100%
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	3	3	100%
IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	12	12	12	100%

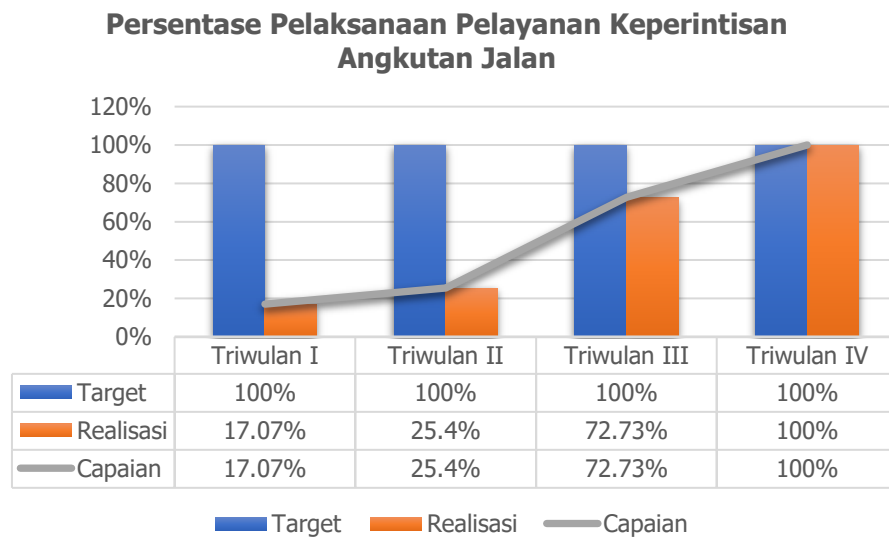
III.2.1.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 senilai 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 senilai 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan.



Gambar III.1 Grafik Realisasi IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
 - SK Dirjen Hubdat KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Hubdat dengan nomor KP-DRJD Tahun 2023 tertuang jaringan trayek angkutan jalan perintis sebagai berikut :

Tabel III. 3 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Prov. Riau TA. 2024

NO	PROVINSI	RUTE TRAYEK	JARAK (Km)
1	RIAU	Sungai Pagar – Gema (Kab. Kampar)	140
2		Minas – Tualang – Gasib - Siak – Bunga Raya – Sungai Apit – Mengkapan (Kab. Siak)	336

- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024
Adapun target IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Tersedianya anggaran;
 - Sarana dan prasarana yang memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak Tersedianya anggaran;
 - Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$IKK\ 1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada periode tw atau tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1.804}{1.804} \times 100\% = \mathbf{100 \%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100 \%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
Adapun anggaran terkait Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 yaitu Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan memiliki target keuangan senilai Rp. 7.738.645.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2024 Rp. 7.422.614.855,- atau mencapai 95,92%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

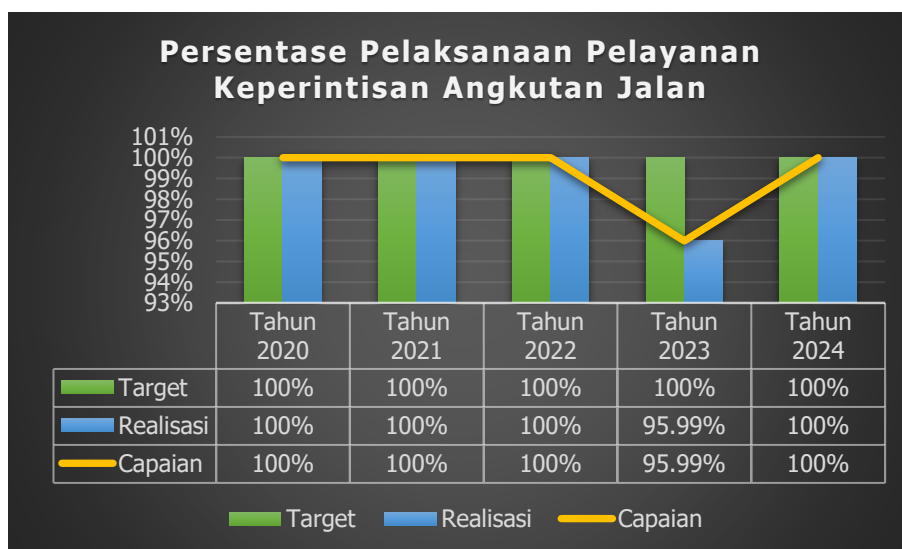
1. Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia angkutan perintis untuk selalu berupaya meningkatkan pelayanan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang belum memadai; dan
3. Melakukan monitoring secara berkala untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 95,99% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 95,99%. Jadi realisasi pada tahun 2024 naik dari tahun 2023 yaitu 100%, untuk rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

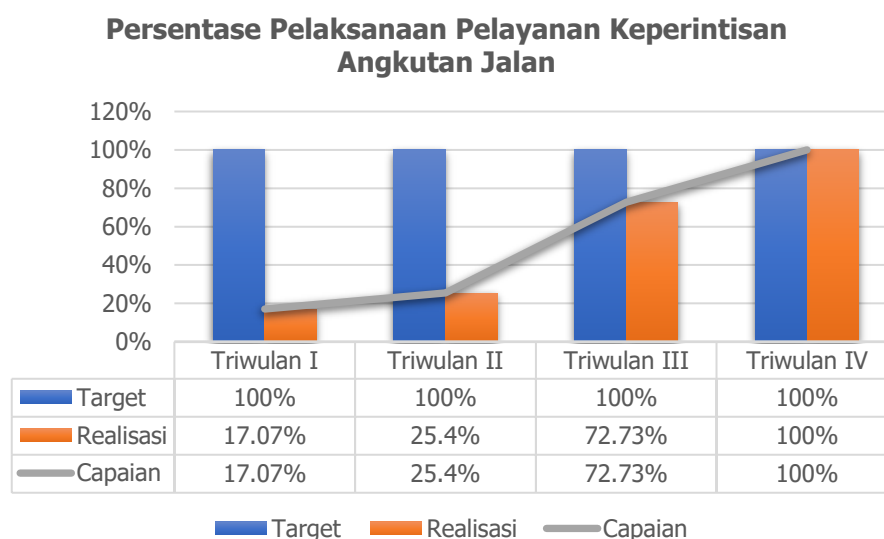
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/
		T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	Turunan
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi																	
1	IKK 1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,99%	95,99%	100%	100%	100%	Naik



Gambar III.2 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* pelaksanaan keperintisan angkutan jalan BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata pelaksanaan keperintisan angkutan jalan secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan BPTD Kelas II Riau adalah 100%. Berikut perbandingan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan BPTD Kelas II Riau dengan rata-rata capaian nasional.

Tabel III.5 *Benchmark Nasional*

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	99.80%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Riau memiliki capaian yang lebih tinggi dari rata-rata

capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di BPTD Kelas II Riau sudah baik.

III.2.1.2.IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun telah melayani Angkutan Barang di jalan. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau memiliki 3 (tiga) Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A sebagai berikut :

1. Terminal Tipe-A BRPS Kota Pekanbaru

Merupakan Terminal Induk dimana merupakan terminal asal-tujuan yang terletak di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Luas lahan 37.470 ha dan Luas Bangunan Terminal sebesar 6.700 ha. Melayani trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Terminal Tipe-A BRPS Kota Pekanbaru memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut:

• Fasilitas Utama :

- 1) Jalur Keberangkatan
- 2) Jalur Kedatangan
- 3) Ruang Tunggu
- 4) Area Parkir
- 5) Perlengkapan Jalan / Rambu
- 6) Loker Penjualan Tiket
- 7) Pusat Informasi
- 8) Gedung Utama/ Kantor
- 9) Peron

• Fasilitas Pendukung :

- 1) Klinik
- 2) Fasilitas Keamanan
- 3) Ruang Istirahat Pengemudi
- 4) Endapan Bus
- 5) Kios/ Kantin
- 6) Masjid
- 7) Toilet

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A BRPS terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

a. Aspek pelayanan publik

Petugas memberikan informasi arah, lokasi terkait situasi di terminal. Mengarahkan bus sebagai petugas pengatur lalu lintas, memberikan pelayanan kepada sopir dan penumpang.

b. Aspek Keamanan

Petugas ditempatkan di beberapa pos pemantauan situasi di terminal upaya menjaga keamanan disekitar terminal, melakukan *rampcheck* untuk pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum sebelum berangkat, dan sistem di terminal sudah dilengkapi dengan CCTV untuk kemanan pengguna terminal.

c. Aspek Kenyamanan

Sudah tersedia fasilitas-fasilitas penunjang di terminal seperti, ruang tunggu, tempat ibadah, ruang istirahat supir, ruang ibu menyusui dan klinik agar kenyamanan pengguna terminal tetap di utamakan.

d. Aspek Sosial

Sifat dan sikap terhadap masyarakat sebagai pengguna terminal harus diterapkan oleh setiap petugas, pelayanan yang ramah dan sopan oleh petugas Terminal Tipe-A BRPS agar terjalin hubungan yang harmonis.

e. Aspek Fasilitas Sarana dan Prasarana

Fasilitas utama dan penunjang sudah tersedia di Terminal Tipe-A BRPS, meskipun beberapa kondisi fasilitas ada yang rusak ringan.

f. Aspek Inovasi dalam Bekerja

Setiap petugas terminal disaat bertugas sudah memiliki inovasi-inovasi dalam bekerja, seperti aktif dalam memberikan informasi pengumuman, pembagian masker secara gratis, dan mengupload beberapa kegiatan-kegiatan terminal di media sosial.

2. Terminal Tipe-A Bangkinang

Merupakan Terminal Tipe-A pada kelas III dengan pelayanan AKAP dan AKDP lebih kedalam sistem transit atau bersifat lintas dengan luas 3600 m² dan terletak di pusat kota Bangkinang, Kab. Kampar. Terminal Tipe-A Bangkinang memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut :

• **Fasilitas Utama :**

- 1) Jalur Kedatangan & Keberangkatan
- 2) Ruang Tunggu
- 3) Area Parkir
- 4) Perlengkapan Jalan / Rambu
- 5) Loker Penjualan Tiket
- 6) Pusat Informasi
- 7) Gedung Utama/ Kantor

• **Fasilitas Pendukung :**

- 1) Endapan Bus
- 2) Fasilitas Keamanan
- 3) Kios/ Kantin
- 4) Musholla
- 5) Toilet
- 6) Wifi
- 7) Ruang Laktasi dan Area Bermain Anak

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Bangkinang terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

- a. Aspek Pelayanan Publik
- b. Aspek Keamanan
- c. Aspek Kenyamanan
- d. Aspek Sosial, dan
- e. Aspek Fasilitas Sarana dan Prasarana
- f. Aspek Inovasi dalam Bekerja

3. Terminal Tipe-A Dumai

Terminal Dumai terletak di Kota Dumai dan berada pada lokasi yang strategis yaitu berdekatan dengan pelabuhan Kota Dumai, memiliki integrasi dengan moda angkutan penyeberangan. Terminal ini melayani trayek angkutan AKAP dan AKDP.

Terminal Tipe-A Dumai memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut :

- **Fasilitas Utama :**

- 1) Jalur Kedatangan
- 2) Jalur Keberangkatan
- 3) Ruang Tunggu
- 4) Area Parkir
- 5) Perlengkapan Jalan / Rambu
- 6) Locket Penjualan Tiket
- 7) Pusat Informasi
- 8) Gedung Utama/ Kantor
- 9) Peron

- **Fasilitas Pendukung :**

- 1) Endapan Bus
- 2) Ruang Istirahat Pengemudi
- 3) Kios/ Kantin
- 4) Musholla
- 5) Toilet

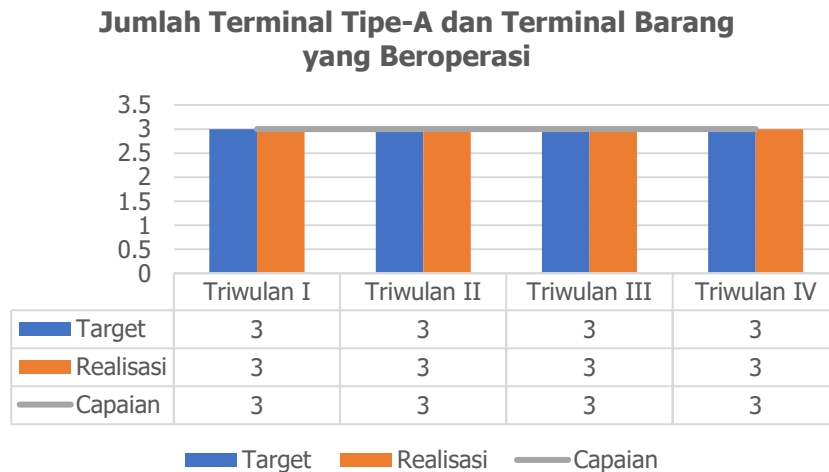
Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Bangkinang terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

- a. Aspek pelayanan publik
- b. Aspek keamanan
- c. Aspek kenyamanan
- d. Aspek sosial, dan
- e. Aspek fasilitas sarana dan prasarana
- f. Aspek inovasi dalam bekerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau tidak memiliki Satuan Pelayanan Terminal Barang.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar 3 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi.



Gambar III.4 Grafik Realisasi IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024
 Adapun target IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi tahun 2024 diperoleh dari POK TA. 2024 dan Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 3 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungannya;
 - Sarana dan prasarana yang memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - SOP tidak terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungannya;
 - Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja
 Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK\ 1.3 &= \text{Jumlah terminal tipe – A dan terminal barang yang beroperasi} \\ &= 3 \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2024 yaitu Pelaksanaan operasional terminal penumpang dan terminal barang memiliki target keuangan senilai Rp. 7.211.699.000,- dengan realisasi hingga akhir Tahun 2024 Rp. 7.207.648.396,- atau mencapai 99,94%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Upaya peningkatan kinerja oleh petugas di terminal dalam melayani masyarakat sebagai pengguna terminal dengan kekompakan antar pimpinan dan staf di lingkungan organisasi pada Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A,
2. Meningkatkan inovasi-inovasi dalam bekerja serta dukungan dari kemajuan dan pengadaan fasilitas pendukung operasional terminal,
3. Memprioritaskan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa angkutan penumpang di area terminal.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi tahun 2024 sebesar 3 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 3 dengan target 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2024 tetap sama pada tahun 2023 yaitu 3, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

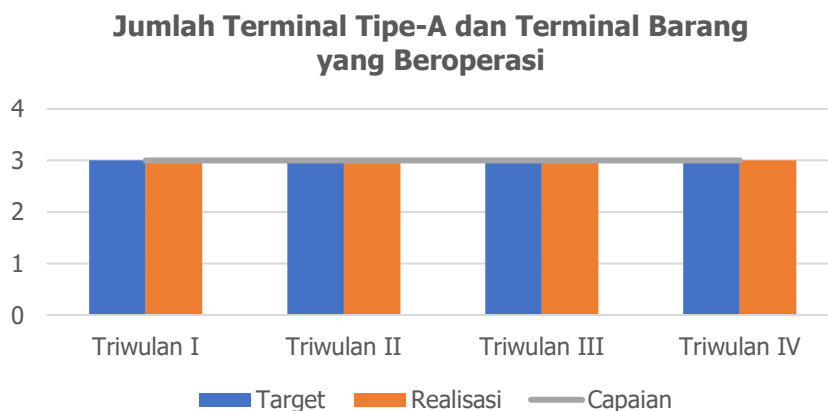
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/ Turun
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi																	
1	IKK 1.3	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	Tetap



Gambar III.5 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi sebesar 3 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi BPTD Kelas II Riau adalah 100%. Berikut perbandingan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi BPTD Kelas II Riau dengan rata-rata capaian nasional.

Tabel III.7 *Benchmark* Nasional

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi BPTD Kelas II Riau memiliki capaian yang sama dengan rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasional terminal tipe-A yang beroperasi di BPTD Kelas II Riau sudah baik.

III.2.1.3. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

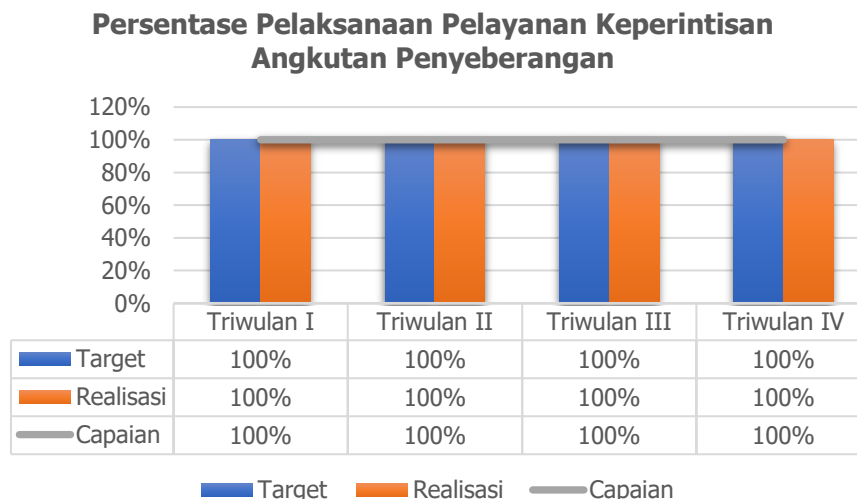
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan di wilayah kerja BPTD Kelas II Riau berupa terlaksananya operasional layanan penyeberangan yang lintasannya sudah ditetapkan oleh Dirjen Hubdat dimana lintasan yg dimaksud merupakan yang ada di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



Gambar III.7 Realisasi IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7330 Tahun 2023 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2024.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024
 Adapun target IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Sarana dan Prasarana yang ada telah memadai;
 - SOP berjalan dengan efektif dan efisien;
 - Jumlah SDM telah memenuhi formasi kebutuhan operasional.
- Faktor Kegagalan
 - Sarana dan Prasarana yang ada belum memadai;
 - SOP tidak berjalan dengan efektif dan efisien;
 - Jumlah SDM belum memenuhi formasi kebutuhan operasional.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\% \\ &= \frac{4}{4} \times 100\% = \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2024 yaitu pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan memiliki target keuangan senilai Rp. 11.290.234.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2024 Rp. 11.035.498.579,- atau mencapai 94,20%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan operasional Pelabuhan SDP perintis yang beroperasi,
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang Pelabuhan SDP Perintis,
3. Mengusulkan pagu kebutuhan dengan optimal dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kegiatan layanan angkutan penyeberangan perintis.

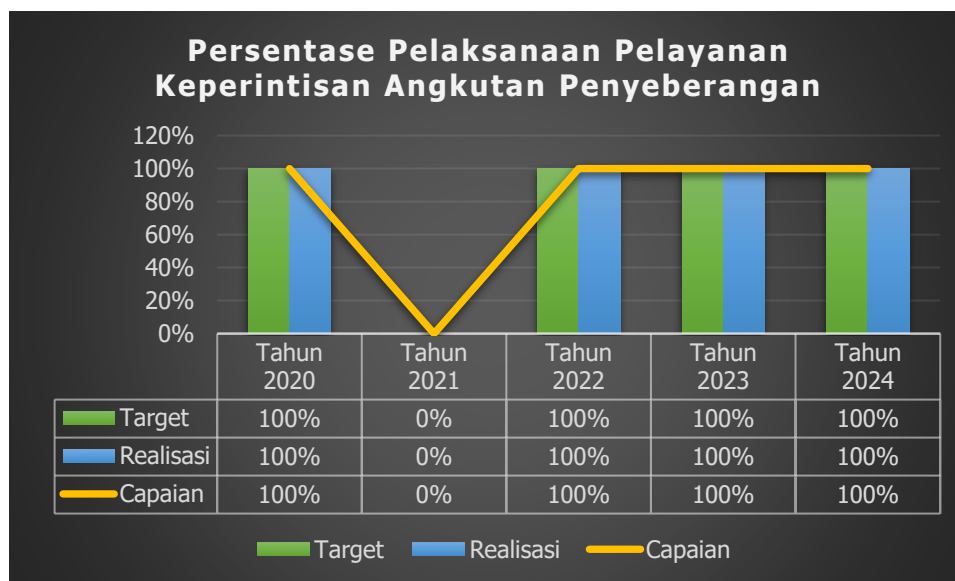
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau tahun 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 100% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2024 tetap

sama dengan tahun 2023 yaitu dari 100%, untuk rincian yang lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

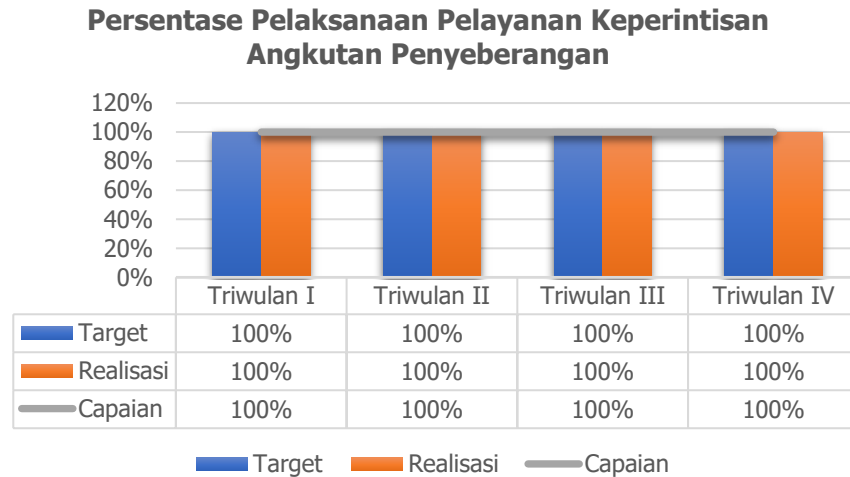
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/ Turun
		T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi																	
1	IKK 1.5	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap



Gambar III.8 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. *Benchmark Nasional*

Untuk *benchmark* persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan BPTD Kelas II Riau adalah 100%. Berikut perbandingan persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan BPTD Kelas II Riau dengan persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan rata-rata nasional.

Tabel III.9 *Benchmark Nasional*

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	97.06%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan BPTD Kelas II Riau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan BPTD Kelas II Riau sudah berjalan dengan baik.

III.2.1.4. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi dihitung berdasarkan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di wilayah kerja BPTD Kelas II Riau.

Target Jumlah Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Kerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mengacu pada isi DIPA-POK yang telah ditetapkan,

pada regulasi PM 06 Tahun 2023, tertera bahwa di wilayah kerja Provinsi Riau terdapat 2 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyberangan dan 2 Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai. Namun terdapat pula pelabuhan lainnya berupa Pelabuhan Wilayah Kerja, sebagai berikut:

Tabel III.10 Target Pelabuhan SDP yang Beroperasi di Prov. Riau & Prov. Kepulauan Riau

No.	Pelabuhan SDP (Satpel)	Pelabuhan SDP (Wilker)
1.	PP Bandar Sri Junjungan (BSJ), Kota Dumai;	
2.		PP Tj. Kapal Rupert, Kab. Bengkalis;
3.		PP Sei Selari, Kab. Bengkalis;
4.		PP Sei Air Putih, Kab. Bengkalis;
5.	PP Tj. Buton Mengkapan, Kab. Siak;	
6.		PP Sagu-Sagu Lukit, Kab. Kepulauan Meranti;
7.		PP Alai Insit, Kab. Kepulauan Meranti;
8.		PP Pecah Buyung, Kab. Kepulauan Meranti;
9.		PP Kampung Balak, Kab. Kepulauan Meranti;
10.	PS Sungai Duku, Kota Pekanbaru;	
11.		PS Dumai, Kota Dumai;
12.	PS Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir.	

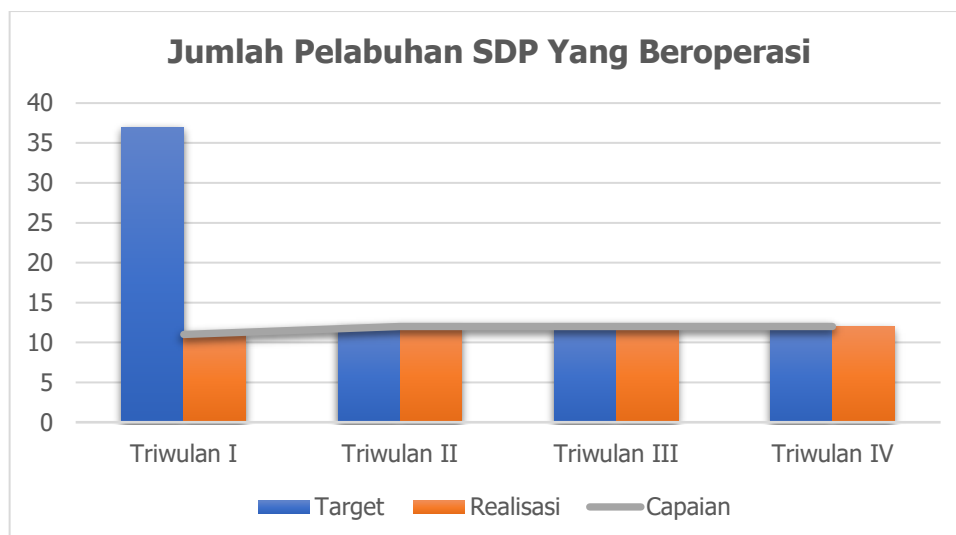
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan, Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan Kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi tahun 2024 sebesar 12 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 12 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.



Gambar III.10 Realisasi IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. DRJD 3339 Tahun 2021.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024

Adapun target IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 37 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024 dan juga sesuai dengan yang tertuang pada DIPA-POK yang dimana beberapa pelabuhan berkaitan dengan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. Pada triwulan II POK yang direvisi mengakibatkan adanya merger anggaran dengan berubahnya jumlah pelabuhan dari yang sebelumnya 37 menjadi 12, mengakibatkan pula perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Sarana dan Prasarana yang ada telah memadai;
 - SOP berjalan dengan efektif dan efisien;
 - Jumlah SDM telah memenuhi formasi kebutuhan operasional.
- Faktor Kegagalan
 - Sarana dan Prasarana yang ada belum memadai;
 - SOP tidak berjalan dengan efektif dan efisien;
 - Jumlah SDM belum memenuhi formasi kebutuhan operasional.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK\ 1.6 &= \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun} \\ &\text{dan dioperasikan s.d tahun (n)} \\ &= 12 \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{12}{12} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 yaitu Operasional Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang memiliki target keuangan senilai Rp. 4.006.690.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2024 Rp. 3.999.194.733,- atau mencapai 99,81%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan operasional Pelabuhan SDP yang beroperasi,
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang Pelabuhan SDP yang beroperasi,
3. Meningkatkan kualitas SDM operasional yang ada pada setiap Pelabuhan.

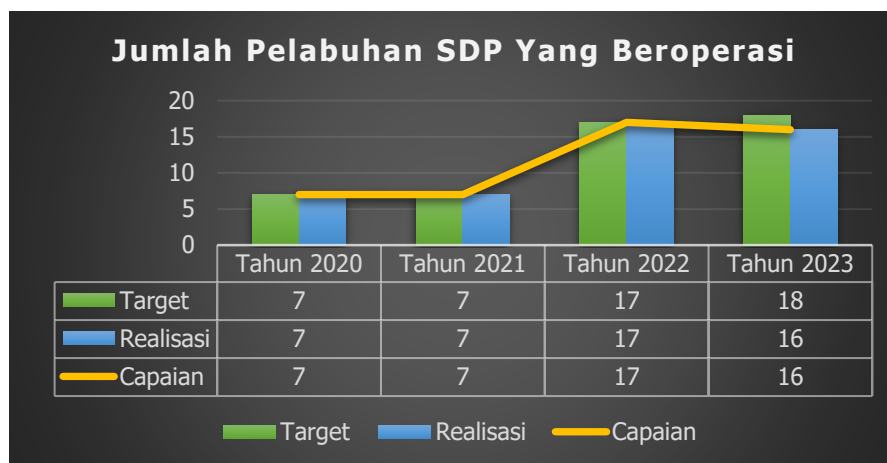
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2024 sebesar 12 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau tahun 2020-2024 sebesar 12 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja Pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 16 dengan target 18

maka capaian kinerja mencapai 88,89%. Untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

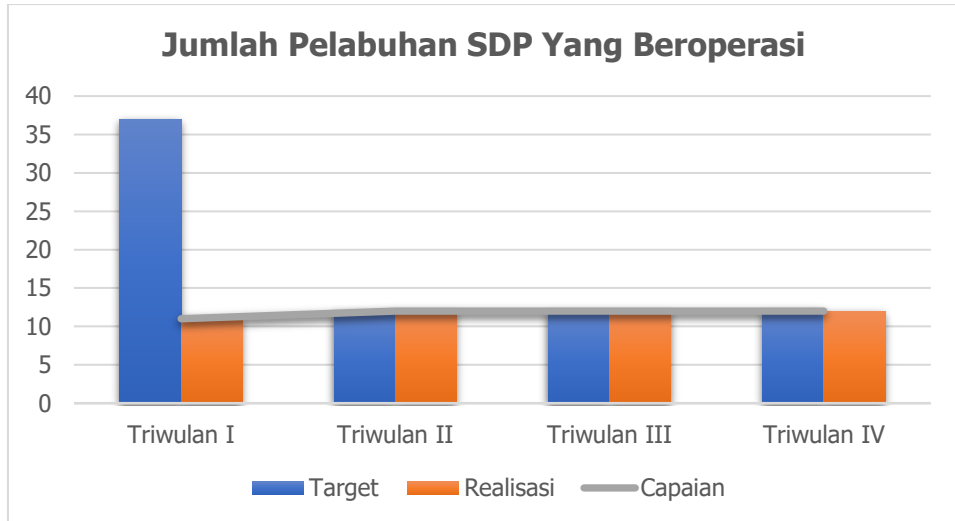
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/ Turun
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi																	
1	IKK 1.6	7	7	100%	7	7	100%	17	17	100%	18	16	88.89%	12	12	100%	Naik



Gambar III.11 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja Pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 12 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 12 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja Pelabuhan SDP yang beroperasi BPTD Kelas II Riau adalah 100%. Berikut perbandingan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi BPTD Kelas II Riau dengan rata-rata nasional.

Tabel III.12 *Benchmark* Nasional

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,30%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi BPTD Kelas II Riau memiliki capaian yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi BPTD Kelas II Riau sudah berjalan dengan baik.

III.2.2. SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdiri atas 3 (tiga) IKK, yaitu:

1. IKK 2.1 : Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A
2. IKK 2.2 : Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A
3. IKK 2.3 : Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.13 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TAHUN 2024		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					100%
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A;	%	100	100	100	100%
IKK 2.2	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A;	%	50	50	50	100%
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP.	%	100	100	100	100%

III.2.2.1.IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A

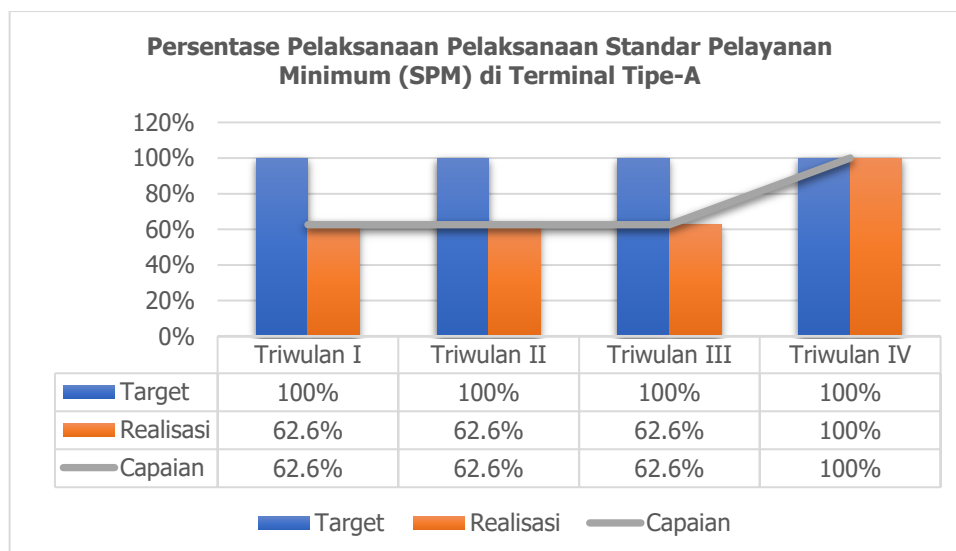
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standar Pelayanan Terminal Penumpang merupakan pedoman bagi penyelenggara terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A.



Gambar III.13 Grafik Realisasi IKK Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
 - PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024
 Adapun target IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Sarana dan prasarana yang memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - SOP tidak terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan dilaksanakan pada masing-masing terminal penumpang di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau. Tabel perhitungan SPM tiap terminal tertera pada lampiran.

Sehingga Realisasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di TTA} = \frac{100 + 100 + 100}{3} = 100\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 melekat pada anggaran Operasional Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A yang memiliki target keuangan senilai Rp. 7.211.699.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2023 Rp. 7.207.648.396,- atau mencapai 99,94%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal Tipe-A;
2. Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal Tipe-A; dan
3. Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada dan meningkatkan kualitas SDM di Terminal Tipe-A.

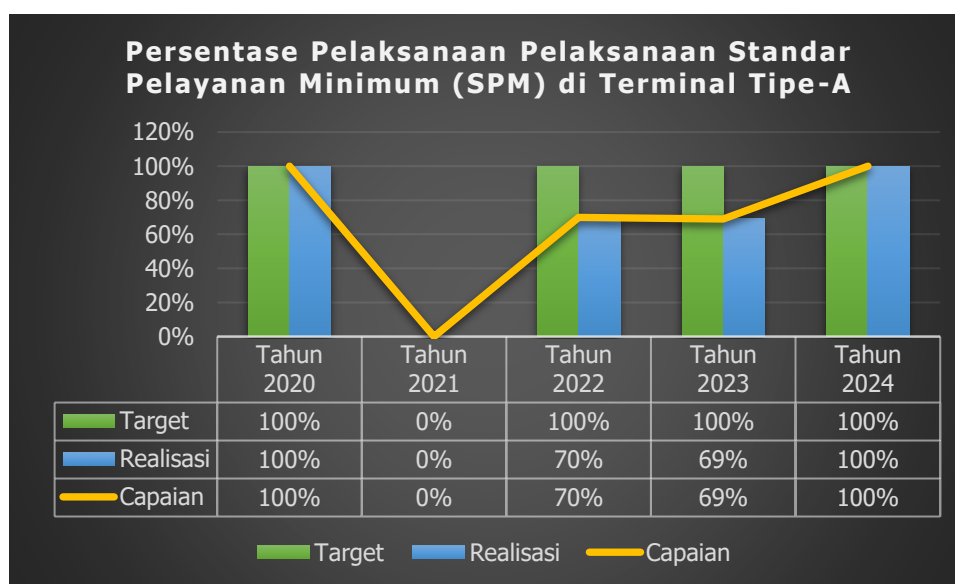
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja

pada tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 69% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 69%. Jadi realisasi pada tahun 2024 meningkat daripada tahun sebelumnya, untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.14 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

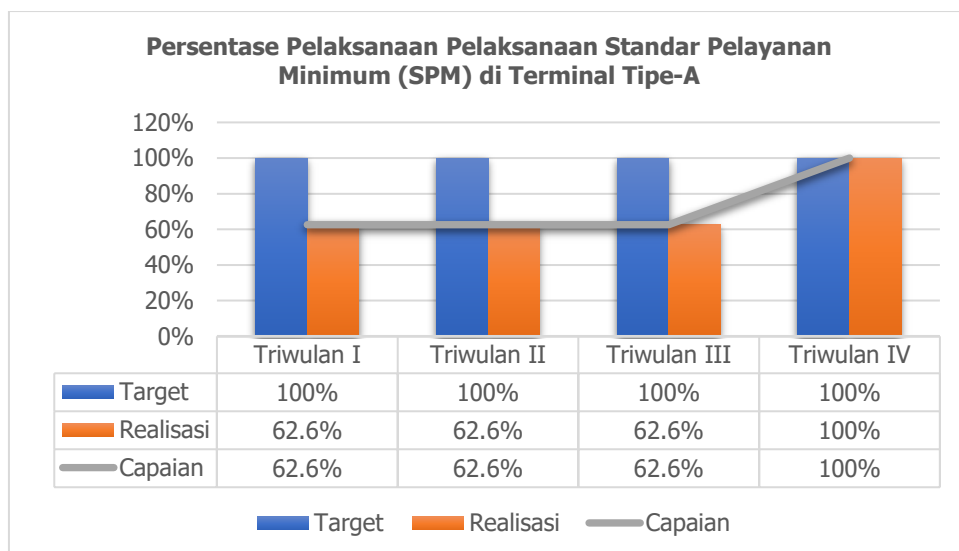
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/ Turun
		T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat																	
1	IKK 2.1	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	70%	70%	100%	69%	69%	100%	100%	100%	Naik



Gambar III.14 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 terhadap target kinerja pada tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Riau adalah 100%. Berikut perbandingan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Riau dengan rata-rata nasional.

Tabel III.15 *Benchmark* Nasional

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	97.33%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Riau memiliki capaian yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II telah berjalan dengan baik.

III.2.2.2. IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe-A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%)

ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe-A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : *Vending Machine*, *Passenger Barrier Gate*, *Vehicle Barrier Gate*, *CCTV*, *Counting Passenger*, *Information Display*.

$$IKK\ 2.2 = \left(\frac{\text{Persentase TTA online} \times 50\%}{\text{Persentase TTA yang telah dipasang perangkat digitalisasi Terminal} \times 50\%} \right)$$

$$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe-A (SMART) :

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	<i>Vending Machine</i>	20%
2	<i>Passenger Barrier Gate</i>	20%
3	<i>Vehicle Barrier Gate</i>	20%
4	<i>CCTV</i>	10%
5	<i>Counting Passenger</i>	10%
6	<i>Information Display</i>	20%

Identifikasi Penerapan SMART Terminal Tipe-A yang sesuai dengan era saat ini merupakan pemenuhan sarana dan prasarana Terminal yang mengembangkan dan mengoptimalkan fasilitas berbasis teknologi serta *connected* Terminal yang saling terhubung guna memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna Terminal. Selanjutnya terminal tidak hanya dijadikan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi, namun terminal juga dijadikan sebagai tempat destinasi makanan hingga tempat perbelanjaan.

Fasilitas Terminal Penumpang berbasis teknologi dimulai dari pelayanan awal Penumpang atau pengguna jasa terminal masuk sampai dengan meninggalkan Terminal, seluruhnya diberikan akses atau bantuan kepada Pengguna jasa Transportasi di terminal dengan teknologi sehingga mendorong *Flow Mobilitas* Penumpang secara mandiri. Dukungan kecanggihan teknologi hal ini sangat diperlukan mulai dari fasilitas *CCTV*, *sensor screening*, *check in*, dan informasi lainnya bagi penumpang dan pengguna jasa lainnya di Terminal. Pelaksanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Terminal tentunya sangat berpengaruh dan sebagai wujud Penerapan SMART Terminal Tipe-A, tentunya hal tersebut perlunya persiapan menyeluruh yang dapat menunjang standarisasi pelayanan minimal untuk meningkatkan potensi yang ada di Terminal. Pada Terminal Tipe-A pun kini telah diterapkan pula *Terminal Online System* (TOS), aplikasi yang digunakan untuk penginputan data operasional terminal.

Terminal Tipe-A yang berada pada ruang lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau adalah sebagai berikut :

1. Terminal Tipe – A Bandar Raya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

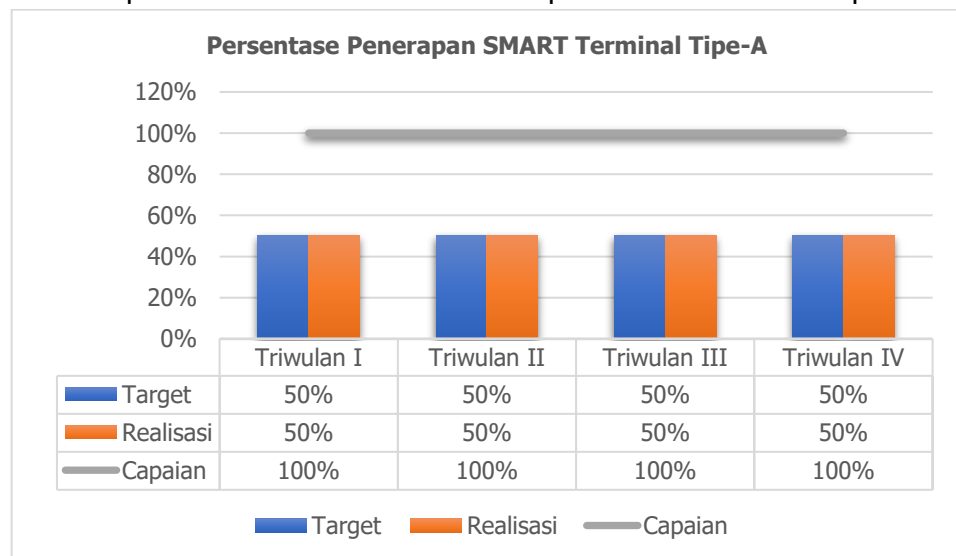
2. Terminal Tipe – A Dumai, Kota Dumai Prov. Riau; dan
3. Terminal Tipe – A Bangkinang, Kab. Kampar Prov. Riau.

Infrastruktur transportasi di Indonesia masih perlu banyak pembenahan dan perhatian khusus. Selain jumlahnya kurang memadai, dari aspek kualitas pelayanan infrastruktur tersebut masih cukup memprihatinkan. Perlu adanya upaya dan kiat penyelamatan infrastruktur transportasi di negara Indonesia, agar eksistensinya dapat memberi manfaat dan menunjang pembangunan. Salah satu cara yang sangat penting dan mendasar adalah penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrastruktur transportasi. SPM berperan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi khususnya terminal penumpang transportasi jalan guna pemenuhan dalam SMART Terminal. SPM meliputi dua aspek yaitu:

1. Lokasi dan letak, aksesibilitas, dan lahan terminal; dan
2. Fasilitas Terminal.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Penerapan SMART Terminal Tipe-A tahun 2024 sebesar 50% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 50% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Penerapan SMART Terminal Tipe-A.



Gambar III.16 Realisasi IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

- PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.
- PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024
Adapun target IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 50% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungannya;
 - Sarana dan prasarana telah memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - SOP tidak terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungannya;
 - Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja
Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase TTA Online} &= \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IKK 2.2} &= (\text{Persentase TTA Online} \times 50\%) + (\text{Persentase TTA yang telah dipasang perangkat digitalisasi Terminal} \times 50\%) \\ &= (100\% \times 50\%) + (50\% \times 50\%) \\ &= 50\% \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{50\%}{50\%} \times 100\% = 50\% \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2024 melekat pada anggaran operasional terminal tipe-A yang memiliki target keuangan senilai Rp. 7.211.699.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2024 Rp. 7.098.461.232,- atau mencapai 99,92%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun Upaya yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau untuk meningkatkan capaian di masa depan dalam menerapkan SMART Terminal adalah :

1. Melakukan usulan anggaran;
2. Melakukan usulan *Detail Engineering Detail* (DED);
3. Melakukan *Feasibility Study* di Terminal Tipe-A di wilayah Kerja BPTD IV;
4. Melakukan pembangunan dan pengembangan terhadap Gedung utama;
5. Melakukan pembangunan *bridge* penghubung antar moda;
6. Memanfaatkan lahan-lahan terminal sebagai pemenuhan penerapan SMART Terminal.

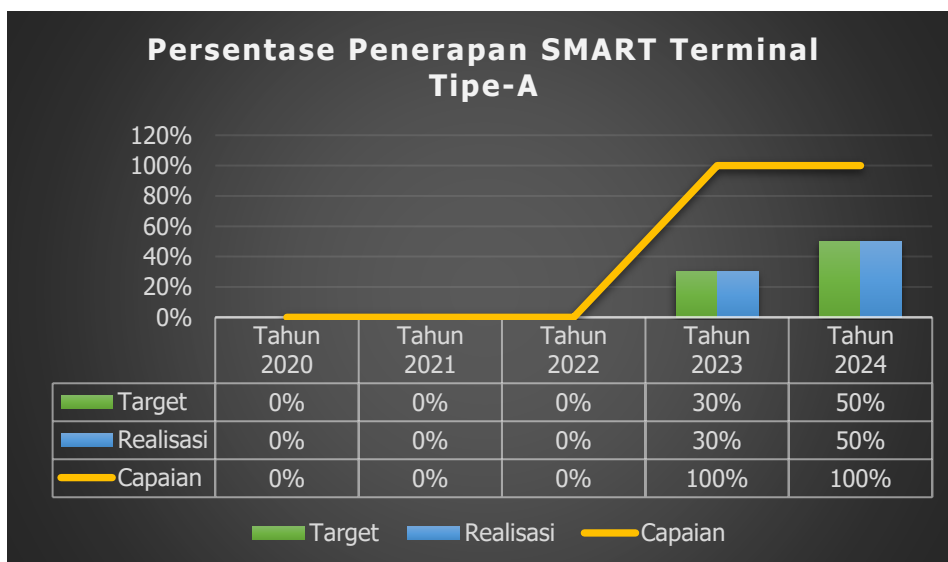
Sehingga Terminal Tipe-A pada wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dapat terealisasi menjadi SMART Terminal Tipe-A yang memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pengguna angkutan umum dan pengguna jasa Terminal.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A tahun 2024 sebesar 50% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 50% maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A sebesar 30% dengan target 30% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2024 meningkat pada tahun 2023, untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.16 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

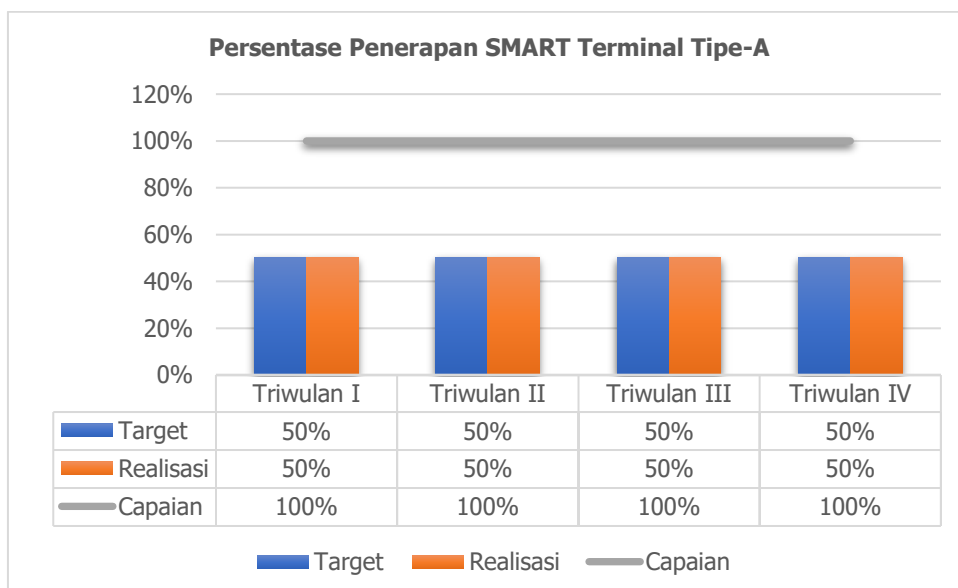
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/ Turun
		T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat																	
1	IKK 2.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	30%	30%	100%	50%	50%	100%	Tetap



Gambar III.17 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A sebesar 50% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 50% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A BPTD Kelas II Riau adalah 100%. Berikut perbandingan persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A BPTD Kelas II Riau dengan rata-rata capaian nasional.

Tabel III.17 *Benchmark* Nasional

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A BPTD Kelas II Riau sama dengan rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe-A di BPTD Kelas II Riau sudah baik.

III.2.2.3.IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

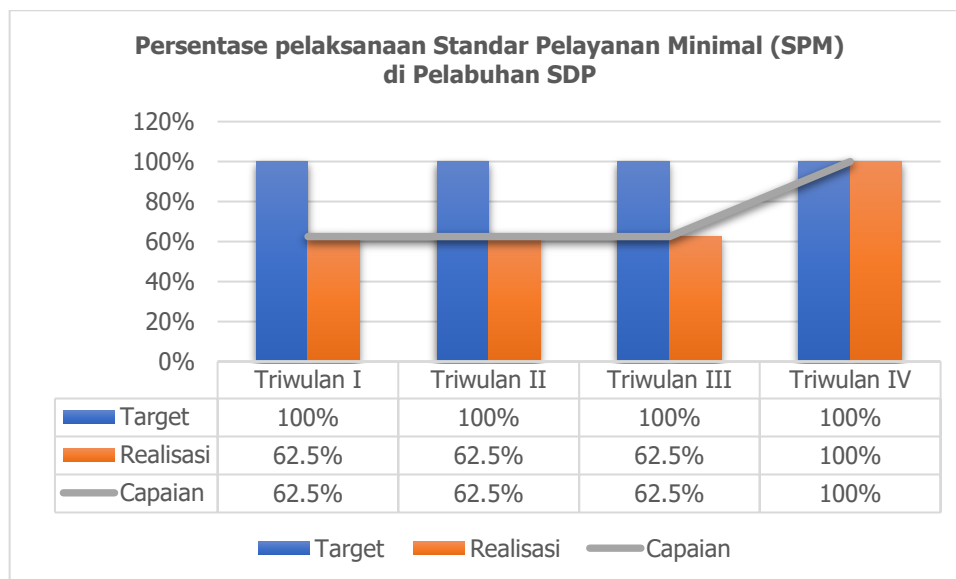
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 (empat belas) Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakahueni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

Selanjutnya diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target

Revisi II Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Pelabuhan SDP.



Gambar III.19 Grafik Realisasi IKK Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
 - PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024
 Adapun target IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki Kualifikasi terkait Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP;
 - Terjadinya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sehingga mempermudah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP;

- Tersedianya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP.
- Faktor Kegagalan
 - Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP;
 - Tidak adanya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP;
 - Tidak adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi terkait pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal di Pelabuhan SDP.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK\ 2.3 &= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang dipantau}} \times 100\% \\ &= \frac{12}{12} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja
- Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 melekat pada anggaran operasional pelabuhan SDP yang memiliki target keuangan senilai Rp. 4.006.690.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2024 Rp. 3.999.194.733,- atau mencapai 99,81%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

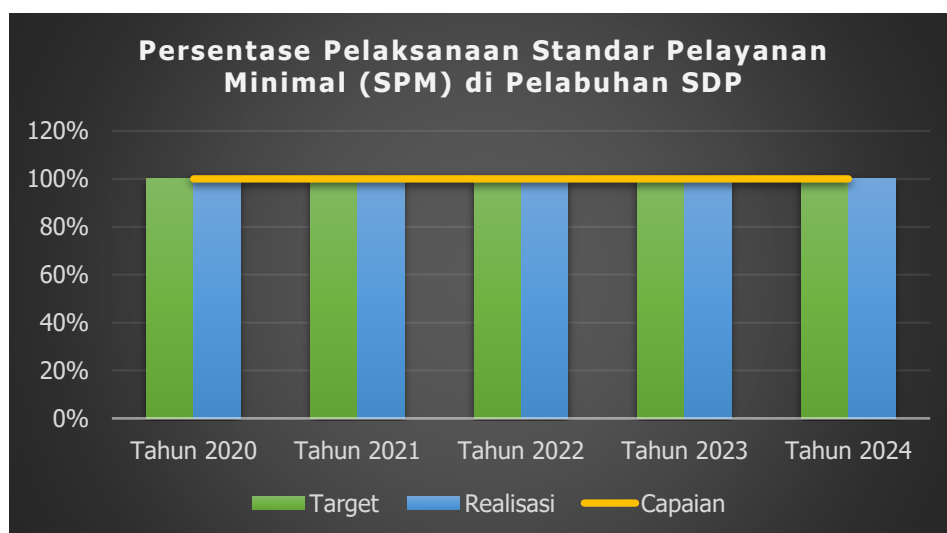
1. Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP;
2. Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP;
3. Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada di pelabuhan SDP.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2023 sama dengan pada tahun 2022 yaitu dari 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.18 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

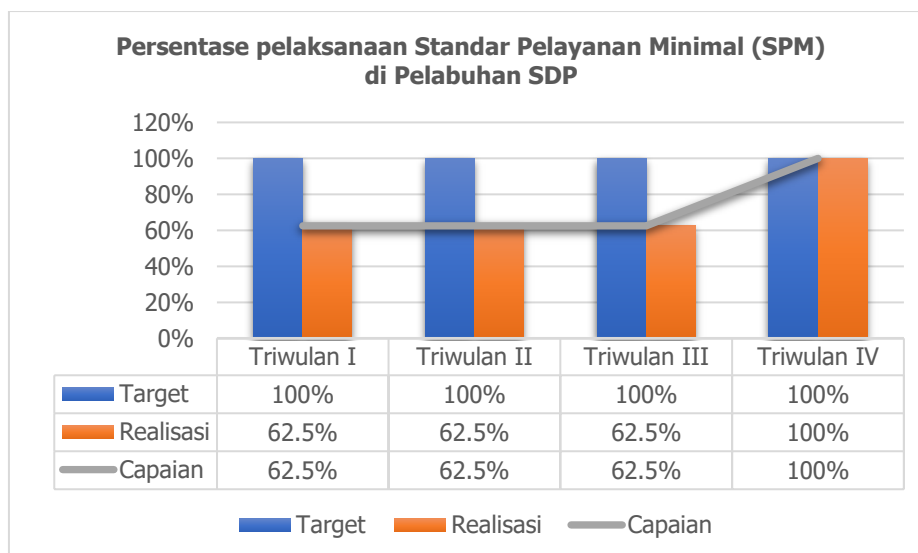
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/ Turun
		T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat																	
1	IKK 2.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap



Gambar III.20 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. *Benchmark Nasional*

Untuk *benchmark* Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja persentase Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP BPTD Kelas II Riau adalah 100%. Berikut perbandingan Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP BPTD Kelas II Riau dengan rata-rata capaian nasional.

Tabel III.19 *Benchmark Nasional*

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	97,31%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP BPTD Kelas II Riau memiliki capaian yang lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP BPTD Kelas II Riau sudah baik.

III.2.3. SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

III.2.3.1.IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

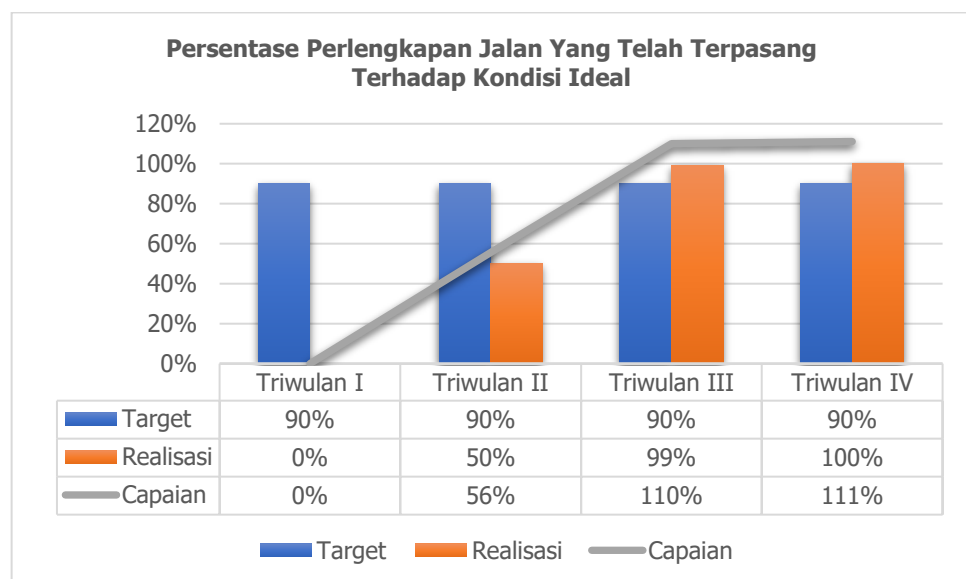
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi :

- 1) Marka Jalan;
- 2) Rambu Lalu Lintas;
- 3) Patok Lalu Lintas;
- 4) Paku Jalan;
- 5) Pagar Pengaman Jalan;
- 6) Alat Penerangan Jalan;
- 7) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 8) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas;
- 9) Cermin Tikungan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal berupa Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Provinsi Riau Tahun 2024 dilaksanakan pada beberapa Ruas Jalan Nasional. Pada tahun ini dapat dilaporkan bahwa realisasi kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di Provinsi Riau telah mencapai angka 100% dari target 90%.



Gambar III.22 Realisasi IKK Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 – 2024;
 - PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024

Adapun target IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 90% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Tersedianya anggaran;
 - Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
 - Optimalnya pengawasan pembangunan.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak adanya anggaran;
 - Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
 - Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK\ 3.1 &= \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\% \\ &= \frac{24735}{26037} \times 100\% = \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

- Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 yaitu Perlengkapan Jalan yang Telah

Terpasang Terhadap Kondisi Ideal memiliki target keuangan senilai Rp. 19.179.601.000,- dengan realisasi hingga tahun 2024 Rp. 19.167.500.627,- atau mencapai 99,9%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja capaian Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia untuk selalu menjaga kualitas dan berupaya menyesuaikan target pekerjaan;
2. Melakukan review berkala untuk beberapa periode untuk koreksi sepanjang progress kerja berjalan; dan

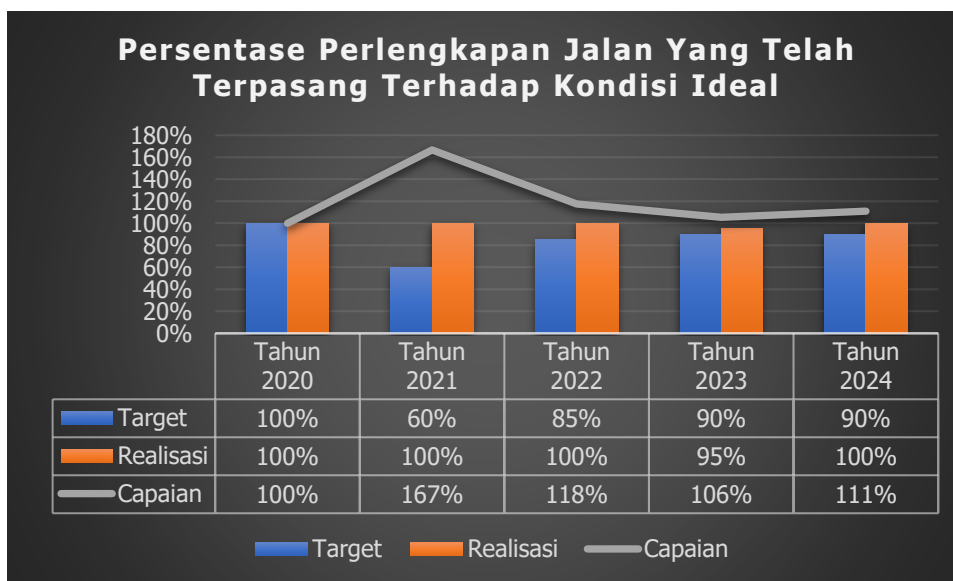
Menyampaikan laporan progress secara berkala serta dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 111% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja BPTD Kelas II Riau sebesar 95% dengan target 90% maka capaian kinerja mencapai 106%. Jadi realisasi pada tahun 2024 lebih tinggi dari pada tahun 2023, untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.20 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

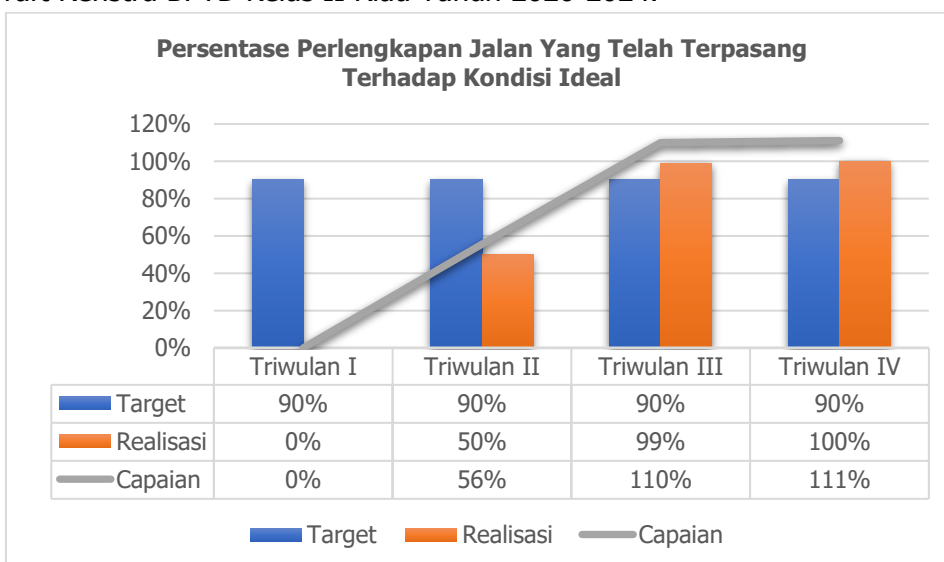
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/
		T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	Turunan
SK 2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat																	
1	IKK 3.1	100%	100%	100%	60%	100%	167%	85%	100%	118%	90%	95%	106%	90%	100%	111%	Naik



Gambar III.23 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 111%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. *Benchmark Nasional*

Untuk *benchmark* Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas II Riau adalah 111%. Berikut perbandingan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas II Riau dengan rata-rata capaian nasional.

Tabel III.21 *Benchmark Nasional*

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	111%	99,02%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas II Riau memiliki capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas II Riau sudah baik.

III.2.3.2.IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

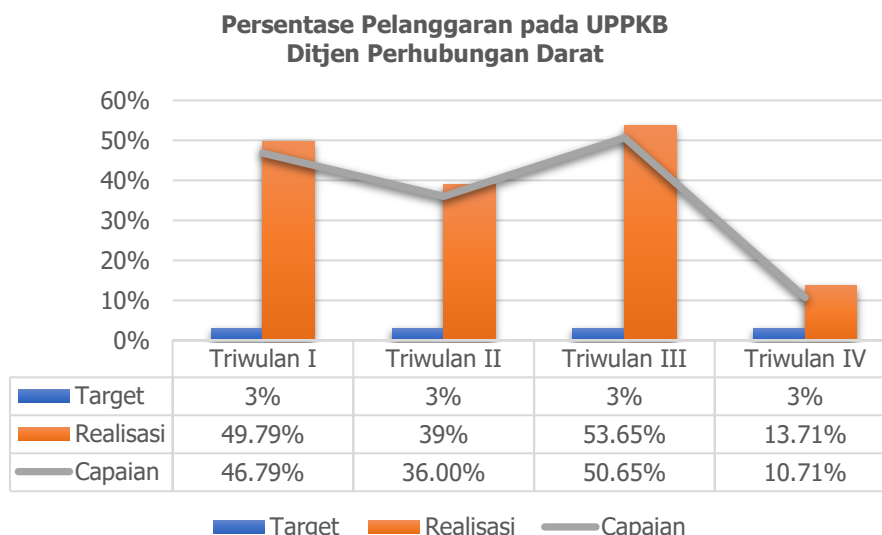
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB.

Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 16,23% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 3% maka capaian kinerja mencapai 13,23%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar III.25 Realisasi IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - PP 80 Tahun 2012 tentang Penindakan Lalu Lintas;
 - Surat Keputusan DJPD Nomor 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - Surat Keputusan DJPD Nomor 5370 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2023
Adapun target IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 3% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2023 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungannya;
 - Sarana dan prasarana yang memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - SOP tidak terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungannya;
 - Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$IKK\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$$

$$= \frac{7.567}{55.174} \times 100\% = 16,23\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{(3\% - (16,23\% - 3\%))}{3\%} \times 100\% = 13,23\%$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 melekat pada anggaran operasional UPPKB yang memiliki target keuangan senilai Rp. 3.486.578.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2024 Rp. 3.484.245.384,- atau mencapai 99,93%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan kendaraan angkutan barang terkait kriteria pelanggaran kendaraan angkutan barang berupa pelanggaran *Over Dimention Over Loading*.
2. Memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang sama;
3. Melaksanakan pengawasan dan penindakan di UPPKB terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.

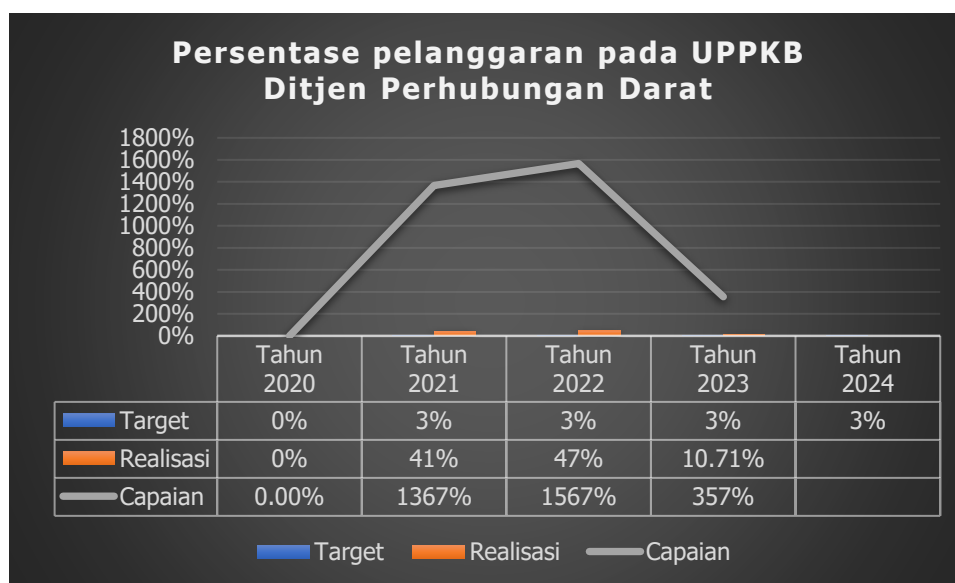
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB tahun 2024 sebesar 16,23% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 3% maka capaian kinerja mencapai 13,23% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja BPTD Kelas II Riau sebesar 13,71%

dengan target 3% maka capaian kinerja mencapai 10,71%. Jadi realisasi pada tahun 2024 lebih rendah dari pada tahun 2023 yaitu 10,71%, untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.22 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

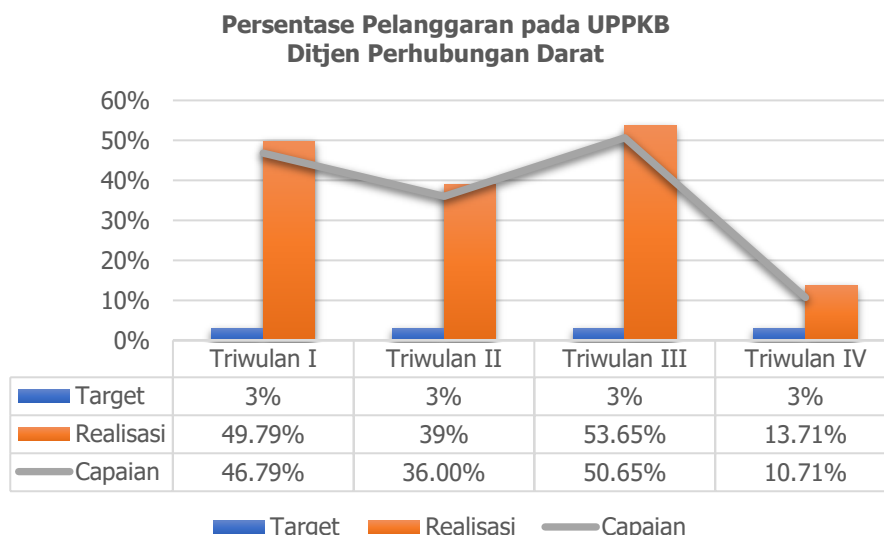
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/ Turun
		T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	
SK 2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat																	
1	IKK 3.2	0%	0%	0%	3%	41%	1367%	3%	47%	1567%	3%	13,71%	10,71%	3%	16,23	13,23	Naik



Gambar III.26 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja persentase pelanggaran pada UPPKB BPTD Kelas II Riau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 16,23% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 3% maka capaian kinerja mencapai 13,23%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja persentase pelanggaran pada UPPKB BPTD Kelas II Riau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB BPTD Kelas II Riau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. *Benchmark Nasional*

Untuk *benchmark* persentase pelanggaran pada UPPKB BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata persentase pelanggaran pada UPPKB BPTD Kelas II Riau secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja persentase pelanggaran pada UPPKB BPTD Kelas II Riau adalah 13,23%. Berikut perbandingan persentase pelanggaran pada UPPKB BPTD Kelas II Riau dengan rata-rata capaian nasional.

Tabel III.23 *Benchmark Nasional*

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	13,23%	103,93%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK persentase pelanggaran pada UPPKB BPTD Kelas II Riau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pelanggaran pada UPPKB BPTD Kelas II Riau sudah berjalan dengan baik.

III.2.3.3. IKK 3.5 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Zona Selamat Sekolah (ZOSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Rute Aman Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi pemukiman menuju sekolah.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan / atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometri jalan.

Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Menghitung :

IKK 3.3

= Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah terbangun s.d tahun (n)

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan.



Gambar III.28 Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS,, RASS, dan Batas Keselamatan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 – 2024.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024
Adapun target IKK Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 6 lokasi yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Pelaksanaan sosialisasi keselamatan ke sekolah – sekolah secara kontinyu dan terus menerus;
 - Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
 - Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
 - Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
 - Kurangnya SDM.
- Perhitungan Realisasi Kinerja
Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan Tahun 2024 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 IKK\ 3.5 &= \text{Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah} \\
 &\quad \text{terbangun s.d tahun (n)} \\
 &= 6 \text{ lokasi}
 \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan Tahun 2024 yang memiliki target keuangan senilai Rp. 2.284.205.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2024 Rp. 2.284.204.638,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

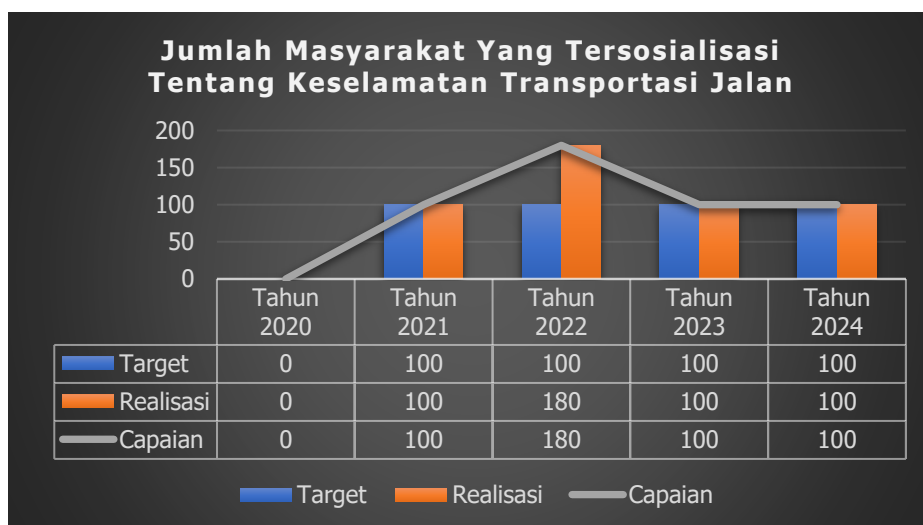
1. Menjangkau ke elemen masyarakat yang lebih tepat sasaran,
2. Menginisiasikan kegiatan yang menarik minat generasi millennial untuk tertarik dan peduli terhadap keselamatan bertransportasi,
3. Melaksanakan sosialisasi dengan banyak cara baik via online maupun via offline.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan tahun 2024 sebanyak 6 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 6 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan sebesar 0 dengan target 0 maka capaian kinerja mencapai 0%. Jadi realisasi pada tahun 2024 lebih tinggi dengan tahun 2023 yaitu 100%, untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.24 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

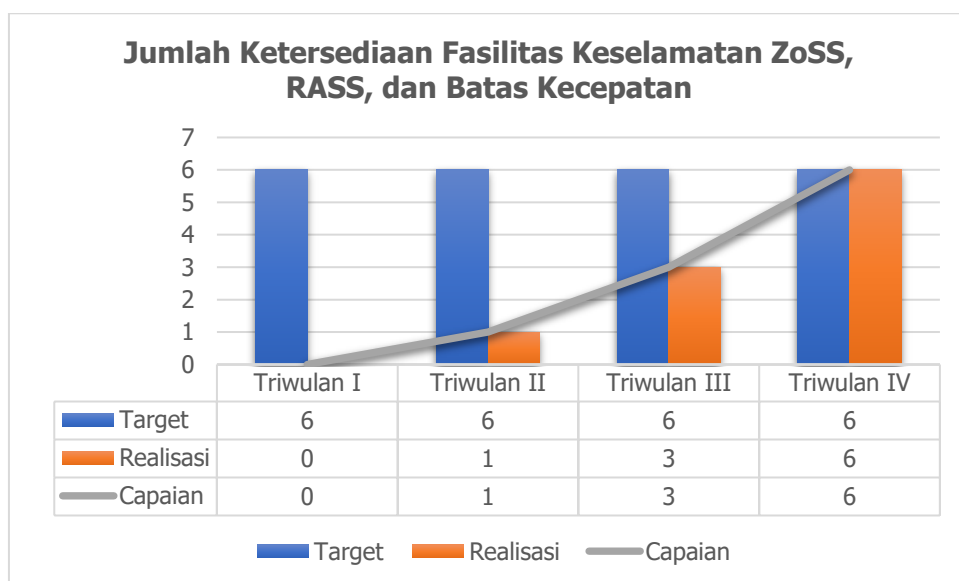
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	Turun
SK 2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat																	
1	IKK 3.5	2	2	100%	3	3	100%	0	0	0%	0	0	0%	100	100	100%	Naik



Gambar III.29 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan tahun 2024 sebanyak 6 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebanyak 6 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan BPTD Kelas II Riau sebanyak 6 lokasi. Berikut perbandingan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan BPTD Kelas II Riau dengan rata-rata capaian nasional.

Tabel III.25 *Benchmark* Nasional

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	6	15,6

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan BPTD Kelas II Riau lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan sudah berjalan dengan cukup baik.

III.2.3.4. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Terkait Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan mengacu pada kegiatan Pekan Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di Provinsi Riau Tahun 2024.

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD.

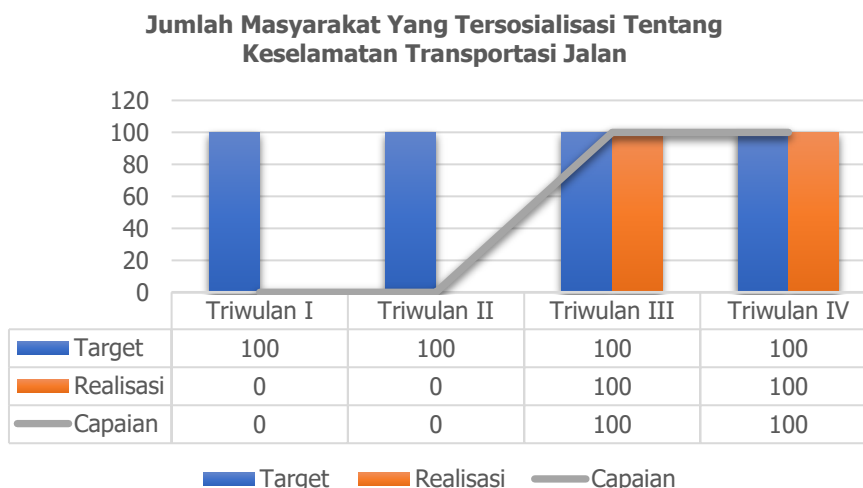
Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Cara Menghitung :

IKK 3.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pada PNKJ

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.



Gambar III.28 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 – 2024.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024
 Adapun target IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 100 Orang yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
 - Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
 - Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
 - Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
 - Kurangnya SDM.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**
Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2024 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK\ 3.5 &= \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pada PNKJ} \\ &= 100 \text{ Orang} \end{aligned}$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% = 100 \end{aligned}$$

- **Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan**
Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2024 yang memiliki target keuangan senilai Rp. 350.000.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2024 Rp. 349.156.230,- atau mencapai 99,76%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

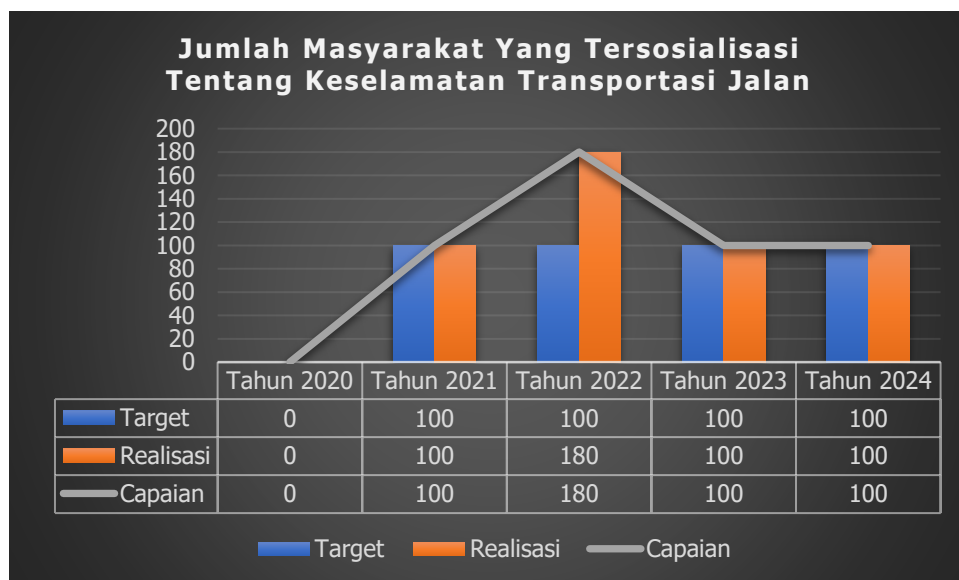
4. Menjangkau ke elemen masyarakat yang lebih tepat sasaran,
5. Menginisiasikan kegiatan yang menarik minat generasi millennial untuk tertarik dan peduli terhadap keselamatan bertransportasi,
6. Melaksanakan sosialisasi dengan banyak cara baik via online maupun via offline.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 100 dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu 100%, untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.24 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

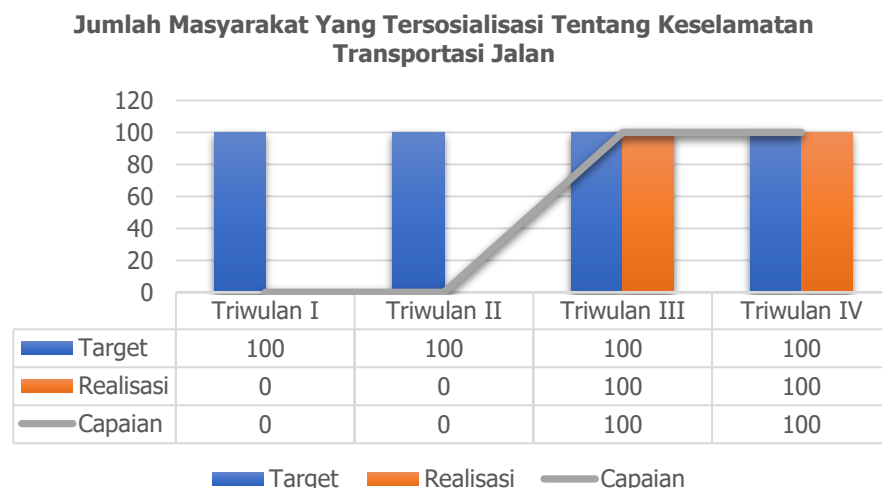
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	Turun
SK 2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat																	
1	IKK 3.5	0	0	0%	100	100	100%	100	180	180%	100	100	100%	100	100	100%	Tetap



Gambar III.29 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. *Benchmark Nasional*

Untuk *benchmark* jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Riau adalah 100%. Berikut perbandingan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Riau dengan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan rata-rata nasional.

Tabel III.25 *Benchmark Nasional*

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Riau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Riau sudah baik.

III.2.3.5. IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4405/AJ.502/DRJD/2020.

Capaian kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah maupun swasta dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah dan jumlah UPUBKB milik swasta. Untuk menghitung indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 4.6 = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi}}{\text{Jumlah Pemda}} \times 100\%$$

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kab. Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Ruang Lingkup Unit Pelaksana Uji Berkala (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kab/Kota di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau yang terdiri 12 (dua belas) Kab/Kota di wilayah Provinsi Riau dengan penetapan standarisasi berupa Akreditasi UPUBKB sebanyak 10 (sepuluh) Kab/Kota.

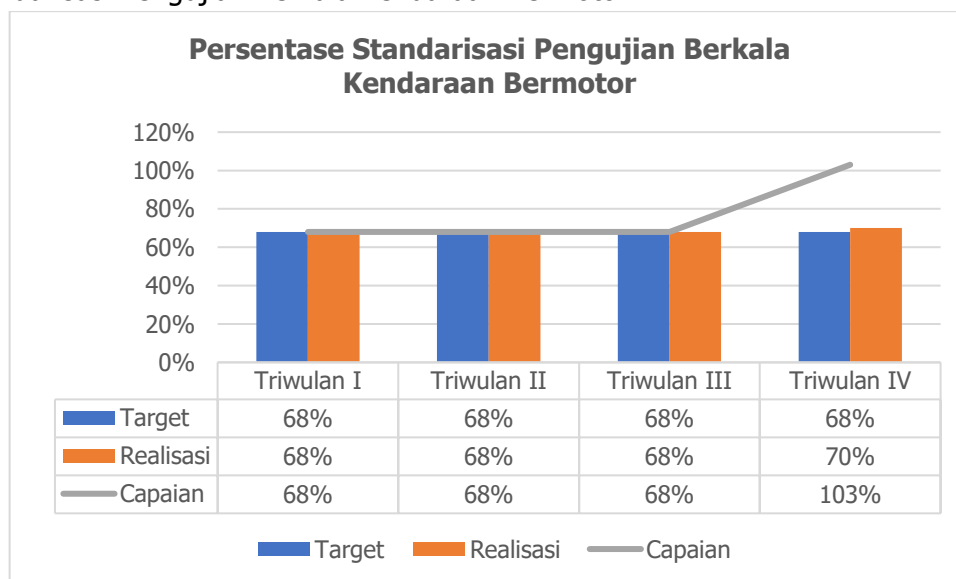
Tabel III.26 Data UPUBKB Dinas Perhubungan di Provinsi Riau dalam pemenuhan Standarisasi berupa Akreditasi UPUBKB

NO	NAMA UPUBKB	STATUS AKREDITASI	TAHUN AKREDITASI	MASA BERLAKU
1	KOTA PEKANBARU	A	2021	2026

NO	NAMA UPUBKB	STATUS AKREDITASI	TAHUN AKREDITASI	MASA BERLAKU
2	KOTA DUMAI	B	2021	2025
3	KABUPATEN SIAK	B	2021	2025
4	KABUPATEN KAMPAR	B	2023	2027
5	KABUPATEN BENGKALIS	B	2021	2025
6	KABUPATEN ROKAN HULU	B	2021	2025
7	KABUPATEN ROKAN HILIR	B	2021	2025
8	KABUPATEN PELALAWAN	B	2023	2027
9	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	B	2021	2025
10	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	B	2021	2025
11	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	TIDAK TERAKREDITASI	-	-
12	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	TIDAK TERAKREDITASI	-	-

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2024 sebesar 70% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 68% maka capaian kinerja mencapai 103%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.



Gambar III.31 Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - Perdirjen Nomor KP.4405/AJ.502/DRJD/2020
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2023
Adapun target IKK Persentase Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 68% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Tersedianya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pengujian;
 - Terpenuhinya SDM yang memahami tentang pengujian;
 - Kesesuaian dan Keakuratan alat pengujian.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak tersedianya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pengujian;
 - Tidak Terpenuhinya SDM yang memahami tentang pengujian;
 - Kesesuaian dan Keakuratan alat pengujian.
- Perhitungan Realisasi Kinerja
Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$IKK \ 7a = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (Prov. Riau + Prov. Kepri + Kota + Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

$$= 70\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{70\%}{68\%} \times 100\% = 103\%$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 yang memiliki target keuangan senilai Rp. 539.260.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2023 Rp. 519.967.261,- atau mencapai 96%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

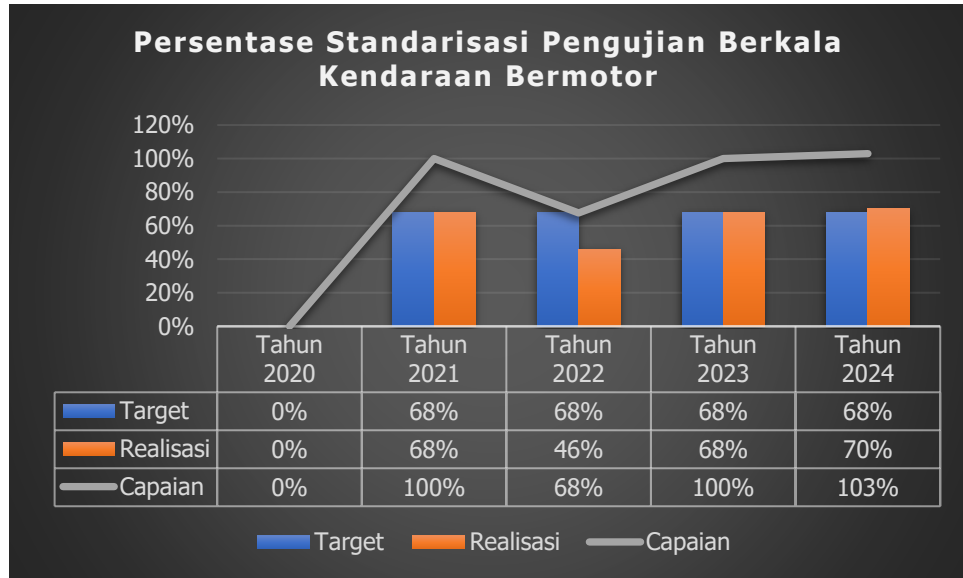
1. Peningkatan klasifikasi Akreditasi UPUBKB melalui Rencana Aksi dan Komitmen Pemerintah Daerah melalui Bupati/Walikota berupa kesanggupan untuk melengkapi kekurangan dengan jangka waktu tertentu dalam terpenuhinya peningkatan klasifikasi Akreditasi UPUBKB yang sudah diperoleh berupa Rencana Aksi dan Komitmen dalam ketersediaan penganggaran serta selanjutnya penerapan pembayaran pelayanan Non Tunai (*Cashless*) dalam peningkatan klasifikasi Akreditasi berdasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan.
2. Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor *drive thure* serta *booking online*. Diharapkan dengan terlaksananya pencapaian dimasa yang akan datang akan meningkatkan pelayanan serta efisien waktu dalam pelaksanaan pelayanan. Dengan adanya sistem *booking online* maka pemilik kendaraan dapat mendaftarkan kendaraannya jauh hari sebelum waktu batas habis masa pengujian dan tidak perlu datang ke pengujian kendaraan bermotor untuk menunggu antrian dan dapat langsung datang ke pengujian kendaraan bermotor saat tanggal booking sudah dipilih.
3. Untuk pengujian kendaraan bermotor *drive thure* tentunya akan mempermudah pengemudi/pemilik kendaraan dalam melaksanakan proses pengujian kendaraan bermotor tanpa perlu turun dari kendaraan. Pengemudi/pemilik kendaraan dapat melaksanakan proses pengujian kendaraan bermotor dengan tetap didalam kendaraan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2024 sebesar 70% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 68% maka capaian kinerja mencapai 103% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 68% dengan target 68% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.27 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

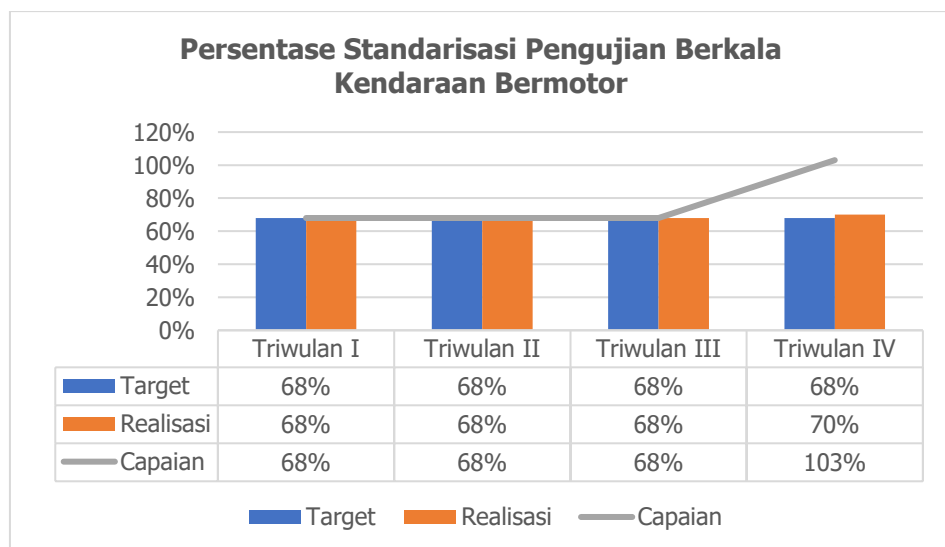
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/
		T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)	Turun
SK 2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat																	
1	IKK 7a	0%	0%	0%	68%	68%	100%	68%	46%	68%	68%	68%	100%	68%	70%	103%	Naik



Gambar III.32 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2024 sebesar 70% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 68% maka capaian kinerja mencapai 103%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Riau 103%. Berikut perbandingan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Riau dengan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor rata-rata nasional.

Tabel III.28 *Benchmark Nasional*

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	103%	101,2%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Riau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Riau sudah berjalan dengan baik.

III.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, mengacu pada kegiatan tupoksi perhubungan darat yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu:

IKK 5.1 : Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.29 *Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat*

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TAHUN 2024		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88	88	88	100%

III.2.4.1.IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2024 dihitung berdasarkan beberapa aspek. Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM);
- Aspek Keuangan; dan
- Aspek Hukum dan Kerjasama.

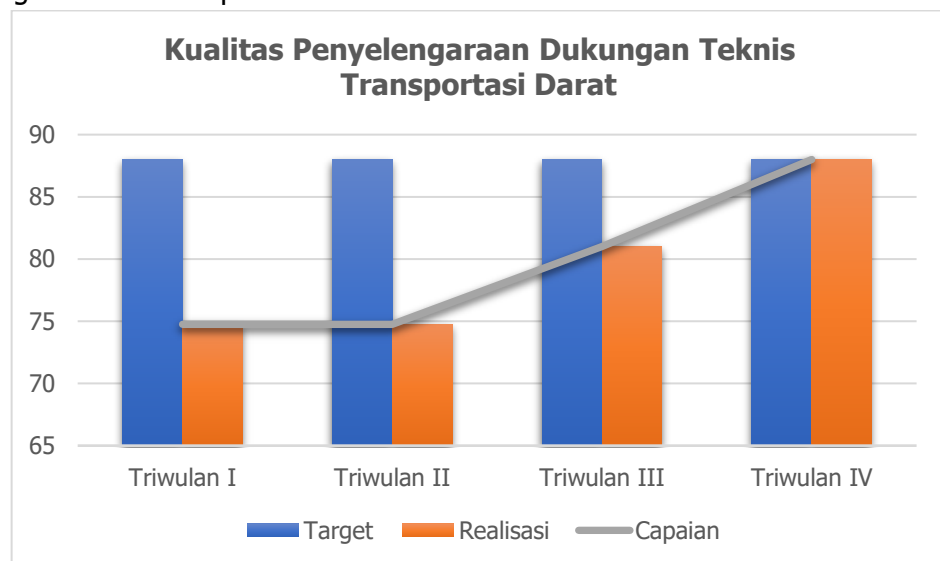
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2024 sebesar 88 jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 88 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Realisasi IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2024.



Gambar III.34 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - Permen PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;
 - Rencana Startegi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 - 2024;
 - PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024
Adapun target IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 88 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;
 - Mempersiapkan dokumen data dukung secara lengkap dan sesuai dengan regulasi;
 - Meningkatkan kuantitas sarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan beserta kualitas SDM petugas.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;
 - Tidak mempersiapkan dokumen data dukung secara lengkap dan sesuai dengan regulasi;
 - Tidak Meningkatkan kuantitas sarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan beserta kualitas SDM petugas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja
Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.30 Perhitungan IKK Tingkat Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Dokumen Perencanaan		12	12
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3	
	2	Perjanjian Kinerja (PK)	3	
	3	Pengisian Input E-planning	3	

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	4 Pengisian Input E-Performance	3	
B	Indeks Profesionalisme ASN	25	25
	1 Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6	
	2 Kompetensi	8	
	3 Kinerja	8	
	4 Disiplin	3	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	27	27
	1 Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	9	
	2 Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	8	
	3 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	24	24
	1 Penyusunan NSPK	6	
	2 Pengelolaan Informasi Publik	8	
	3 Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	5	
	4 Pelaksanaan Advokasi Hukum	5	
TOTAL			88

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{88}{88} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 yang memiliki target keuangan senilai Rp. 2.111.437.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2024 Rp. 2.111.059.809,- atau mencapai 99,98%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merencanakan dengan sebaik-baiknya serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran, baik Dinas Perhubungan di daerah wilayah kerja dan juga dengan Kementerian Perhubungan Pusat;

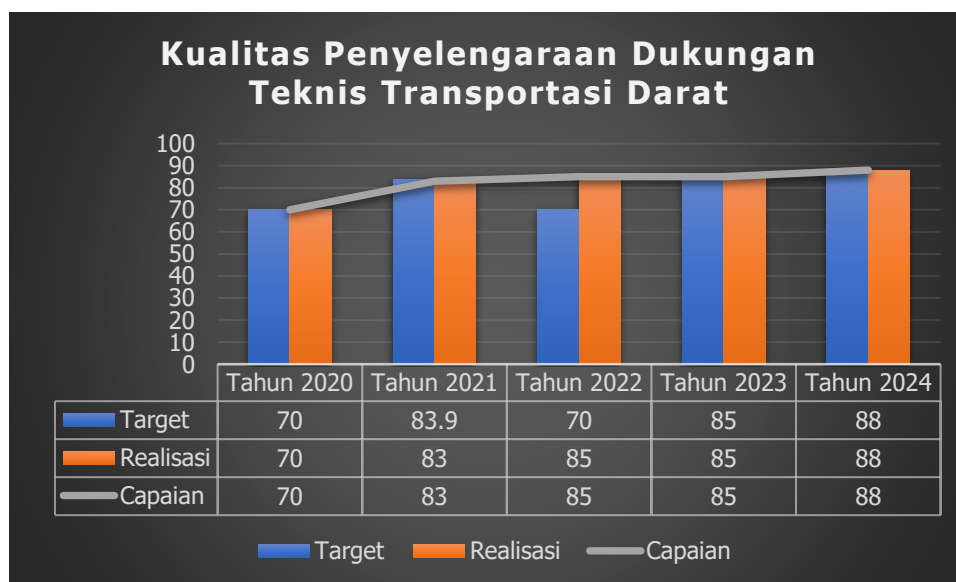
2. Meningkatkan kualitas pegawai dengan diklat maupun bimtek, kedisiplinan sehingga meningkat pula kinerja instansi BPTD;
3. Mengelola keuangan dengan penyerapan yang tepat sasaran dan mencapai target serap seoptimal mungkin, meningkatkan jumlah BMN yang ber-status PSP;
4. Melakukan birokrasi yang transparan dan bekerja sama dengan baik terhadap seluruh stakeholder.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2024 sebesar 88 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 88 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebesar 85 dengan target 85 maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.31 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

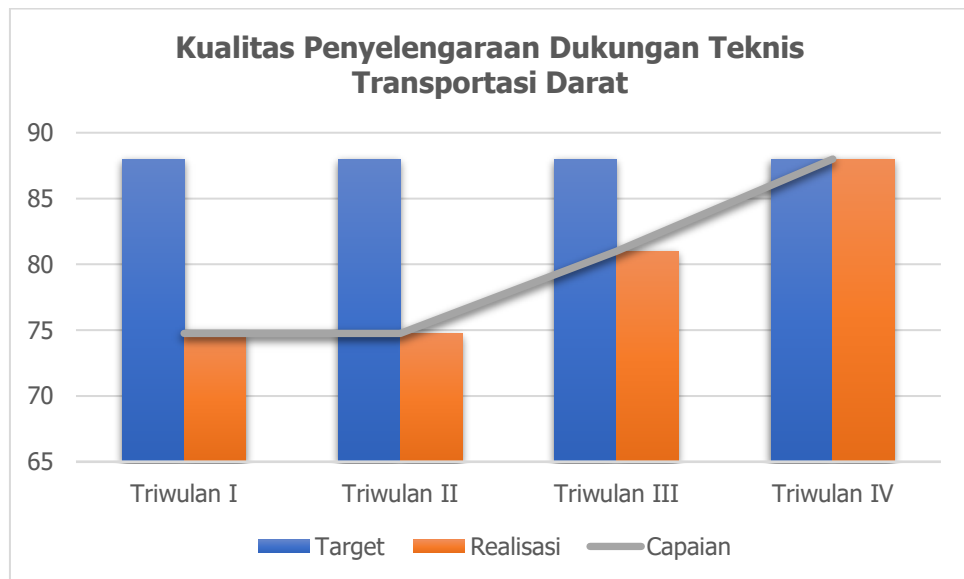
No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/ Turun
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	
SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat																	
1	IKK 5.1	70	70	100%	83,9	83	98,9%	70	85	121%	85	85	100%	88	88	100%	Tetap



Gambar III.35 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebesar 88 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Riau 2020-2024 sebesar 88 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Riau adalah 100%. Berikut perbandingan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Riau dengan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II rata-rata nasional.

Tabel III.32 *Benchmark* Nasional

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	101,39%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis

transportasi darat BPTD Kelas II Riau lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Riau sudah berjalan dengan baik.

III.2.5. SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Perkantoran Perhubungan Darat, mengacu pada kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu:

IKK 6.1 : Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.33 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					83,10%
IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	83,10	83,10%

III.2.5.1. IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

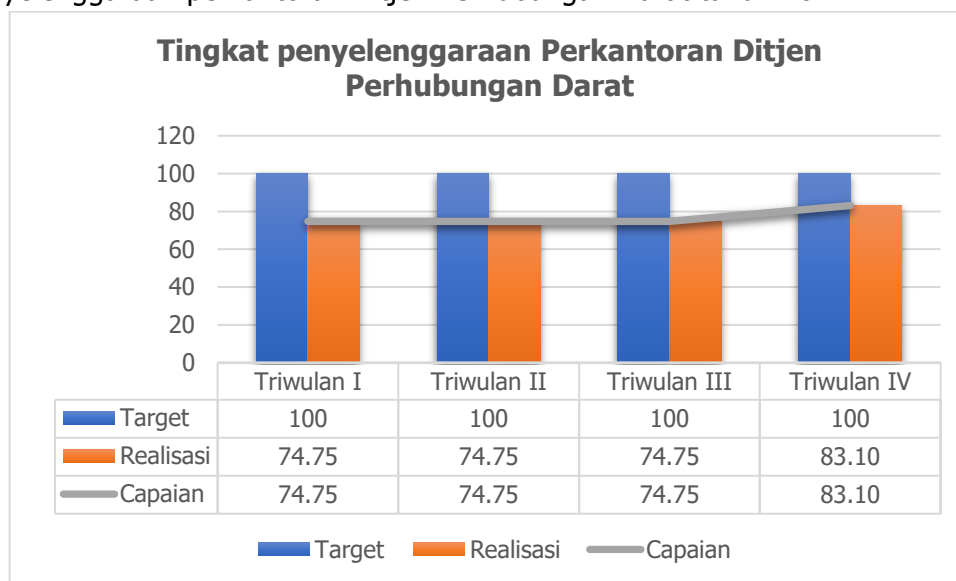
Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

Capaian kinerja kualitas penyelenggaraan perkantoran Ditjen perhubungan Darat tahun 2024 dihitung berdasarkan lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja). Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 sebesar 83,10 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2023 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 83,10%.

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian IKK tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024.



Gambar III.37 Realisasi IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - Permen PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;
 - Rencana Startegi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 - 2024;
 - PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024
Adapun target IKK tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 dengan target sebesar 100 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;
 - Mempersiapkan dokumen data dukung secara lengkap dan sesuai dengan regulasi;
 - Meningkatkan kuantitas sarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan beserta kualitas SDM petugas.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;

- Tidak mempersiapkan dokumen data dukung secara lengkap dan sesuai dengan regulasi;
 - Tidak Meningkatkan kuantitas sarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan beserta kualitas SDM petugas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja
Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :
Perhitungan dilakukan dengan bobot sebagai berikut:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (35%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel III.34 Perhitungan IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		15%	0.75
	1	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8%	0.4
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7%	0.35
B	Tingkat Kepuasan Staf		35%	1.33
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	63.5
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	70
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	10.80
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	0.22
TOTAL				83.10

- Perhitungan Capaian Kinerja
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{83,10}{100} \times 100\% = \mathbf{83,10\%}
 \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 yang memiliki target keuangan senilai Rp. 29.567.169.000,- dengan realisasi hingga Tahun 2024 Rp. 29.398.664.524,- atau mencapai 99,43%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

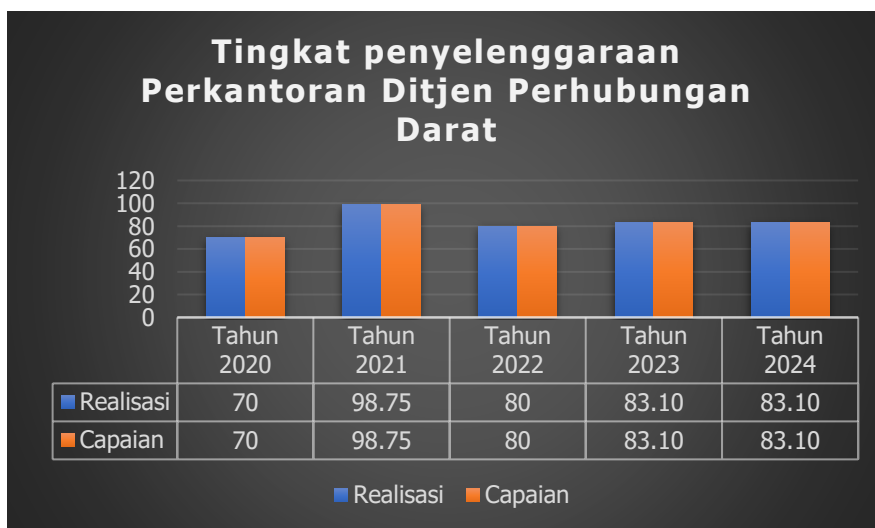
1. Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan pada aspek layanan perkantoran;
2. Membuat perencanaan terkait kebutuhan-kebutuhan dan menuangkannya pada Rencana Kerja Anggaran-Layanan Perkantoran;
3. Merealisasikan rencana tersebut dengan efektif dan efisien.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 83,10 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 83,10% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 realisasi kinerja tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 83,10 dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 83,10%. Jadi realisasi pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu 83,10%, untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.35 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

No	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/ Turun
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	
SK 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat																	
1	IKK 6.1	70	70	100%	80	98.75	123%	80	80	100%	100	83.1	83.1%	100	83.1	83.1%	Tetap

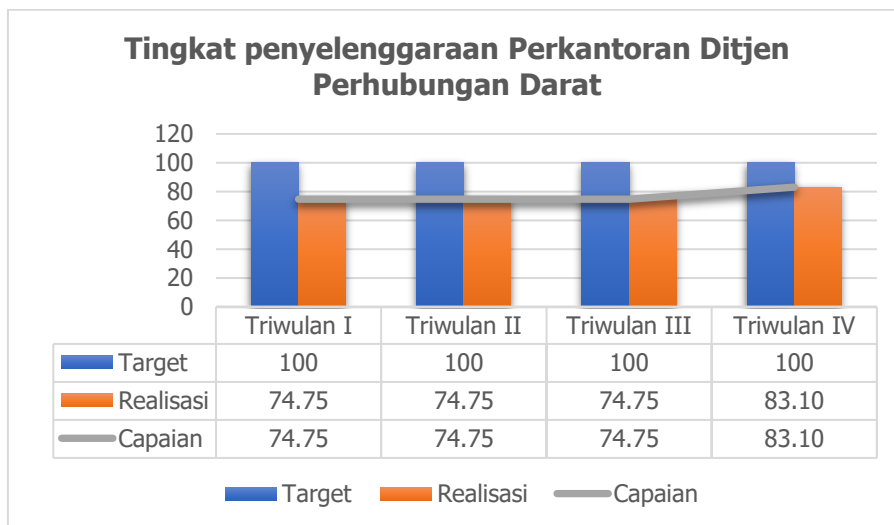


Gambar III.38 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024

Realisasi kinerja tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 83,10 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 83,10%. Pencapaian ini digambarkan pada

Gambar Perbandingan Realisasi Kinerja tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.



Gambar III.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.

a.7. *Benchmark Nasional*

Untuk *benchmark* tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Riau dilihat dari rata-rata tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat secara nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Riau, capaian kinerja tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Riau adalah 83,10%. Berikut perbandingan tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Riau dengan tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat rata-rata nasional.

Tabel III.36 *Benchmark Nasional*

NO	URAIAN	BPTD KELAS II RIAU	RATA-RATA NASIONAL
1	Persentase Capaian Kinerja	83,10%	98,74%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Riau lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Riau sudah terselenggara dengan baik.

III.3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

III.3.1.1. Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp. 167.004.214.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

a.1. Rincian Per Sumber Dana Triwulan I Tahun 2024

RM	Rp	97,824,248,000	58.58%
PNBP	Rp	54,179,966,000	32.44%
SBSN	Rp	15,000,000,000	8.98%
Total	Rp	167,004,214,000	100%

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp	11,117,083,000	6.66%
Belanja Barang	Rp	71,422,676,000	42.77%
Belanja Modal	Rp	84,464,455,000	50.58%
Total	Rp	167,004,214,000	100%

III.3.1.2. Realokasi Anggaran Tahun 2024

a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Triwulan IV Tahun 2024

RM	Rp	107,548,315,000	61.25%
PNBP	Rp	53,042,595,000	30.21%
SBSN	Rp	15,000,000,000	8.54%
Total	Rp	175,590,910,000	100%

a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp	19,796,354,000	11.27%
Belanja Barang	Rp	71,382,548,000	40.65%
Belanja Modal	Rp	84,412,008,000	48.07%
Total	Rp	175,590,910,000	100%

a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR
Belanja Pegawai	11,117,083,000	8,679,271,000	19,796,354,000
Belanja Barang	71,422,676,000	40,128,000	71,382,548,000
· RM	71,422,676,000	40,128,000	71,382,548,000
· PNBP	0	0	0
Belanja Modal	84,464,455,000	52,447,000	84,412,008,000
· RM	15,284,489,000	54,127,519,000	69,412,008,000
· PNBP	54,179,966,000		
· SBSN	15,000,000,000	0	15,000,000,000
TOTAL	167,004,214,000	8,771,846,000	175,590,910,000

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2024

NOMENKLATUR KEGIATAN	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR
BPTD Kelas II Riau	167,004,214,000	8,586,696,000	175,590,910,000
Program Infrastruktur Konektivitas	146,067,388,000	92,575,000	145,974,813,000
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	77,892,765,000	1,193,592,000	76,699,173,000
Pelayanan Transportasi Darat	26,218,389,000	0	26,218,389,000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	36,084,311,000	1,101,017,000	37,185,328,000
Penunjang Teknis Transportasi Darat	5,871,923,000	0	5,871,923,000
Program Dukungan Manajemen	20,936,826,000	8,679,271,000	29,616,097,000
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	9,819,743,000	0	9,819,743,000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	11,117,083,000	8,679,271,000	19,796,354,000

III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2024

Berikut merupakan data pagu dan realisasi dari tahun 2020 hingga 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.37 Perbandingan Pagu & Realisasi

NO	TAHUN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	
		RP.	RP.	RP.	%
1	2017	746.173.000	746.173.000	735.012.888	98,50%
2	2018	154.886.371.000	155.881.123.000	149.097.305.920	95,65%
3	2019	101.436.870.000	92.185.911.000	87.366.439.252	94,77%
4	2020	105.765.540.000	114.521.748.000	113.299.373.799	98,93%
5	2021	226.695.617.000	154.373.472.000	153.524.008.177	99,45%
6	2022	145.564.552.000	146.752.998.000	146.660.930.163	99,94%
7	2023	217.438.999.000	200.406.108.000	200.026.849.087	99,81%
8	2024	167.004.214.000	175.590.910.000	163.496.712.355	93,11%

III.3.2. Realisasi Anggaran TA. 2024

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 163.496.712.355,- atau mencapai 93,11% dari total pagu sebesar Rp. 175.590.910.000,-, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan TA. 2024

Tabel III.38 Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Pada Periode TA. 2024

KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	TRIWULAN IV	
			REALISASI	%
403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau	175,590,910,000	163,496,712,355	93.11%
02203GA	Program Infrastruktur Konektivitas	145,974,813,000	134,030,126,888	91.82%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	76,699,173,000	65,233,365,309	85.05%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	26,218,389,000	26,208,550,129	99.96%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	37,185,328,000	37,068,616,459	99.69%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5,871,923,000	5,519,594,991	94.00%
02203WA	Program Dukungan Manajemen	29,616,097,000	29,466,585,467	99.50%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	9,819,743,000	9,763,813,302	99.43%
4671	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	19,796,354,000	19,702,772,165	99.53%

III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja TA. 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	19,796,354,000	19,702,772,165	99.53%
2	Belanja Barang	71,382,548,000	66,263,879,946	92.83%
3	Belanja Modal	84,412,008,000	77,530,060,244	91.85%
TOTAL		175,590,910,000	163,496,712,355	93.11%

III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana TA. 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	107,548,315,000	102,222,695,293	95.05%
2	PNBP	53,042,595,000	46,274,160,062	87.24%
3	SBSN	15,000,000,000	14,999,857,000	100%
TOTAL		175,590,910,000	163,496,712,355	93.11%

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Sasaran Kegiatan per-Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.39 Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan III)
1	SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmuda Transportasi	61.70%	11.77%	49.93%	81.35%	31.88%	49.47%	93.18%	52.20%	40.99%	100%	97.04%	2.96%
2	SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	81.70%	19.60%	62.10%	81.70%	46.60%	35.10%	81.70%	69.41%	12.29%	75.03%	99.32%	24.29%
3	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	14.11%	4.68%	9.43%	43.53%	12.26%	31.27%	73.89%	46.94%	26.95%	99.30%	99.34%	0.04%
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	18.75%	30.57%	11.82%	92.05%	58.44%	33.60%	92.05%	76.27%	15.78%	100%	99.98%	0.02%
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	74.75%	46.16%	28.59%	74.75%	84.26%	9.51%	74.75%	82.03%	7.28%	83.70%	99.43%	15.73%
Rata-Rata		50.20%	22.56%	27.64%	74.68%	46.69%	27.99%	83.11%	65.37%	17.74%	91.61%	99.02%	7.42%

III.3.3.2. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat bahkan level perubahan dalam ruang lingkup banyak matra yang beberapa saling berdampak terhadap administrasi dan wewenang menyebabkan perubahan dan pergantian beberapa pejabat internal BPTD sehingga proses melaksanakan kegiatan mengalami penyesuaian dokumen yang cukup menyita waktu;
2. Proses revisi DIPA merupakan salah satu hambatan dalam penyerapan dana APBN karena lamanya waktu dalam melakukan revisi DIPA.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

IV.

PENUTUP

IV.1. Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

IV.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2024 ini terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang capaiannya telah/lebih dari target yang telah ditentukan;
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.